

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Tesis

**Oleh:
M. IRFAN HAMMADI AHADIS
NPM 2120051033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS MEMBANGUN DESA (IDM) DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

M. Irfan Hammadi Ahadis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Utara selama tahun 2018-2023, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi nilai IDM, dan mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk memberikan dampak terhadap IDM di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif naratif pada IDM untuk mengetahui karakteristik kinerja dan status IDM, melakukan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen-dana desa, alokasi dana desa, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin- terhadap IDM, dan analisis SWOT untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk peningkatan IDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja IDM di beberapa kecamatan mengalami stagnasi atau penurunan. Analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen mempengaruhi IDM secara signifikan, dengan alokasi dana desa, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, optimalisasi pengelolaan desa berbasis teknologi digital, pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata, peningkatan pengawasan sektor pariwisata, dan peningkatan pengembangan produk desa.

Kata Kunci: Indeks desa membangun, dana desa, kepadatan penduduk, penduduk miskin, strategi pembangunan desa

ABSTRACT

FACTORS INFLUENCING THE VILLAGE DEVELOPMENT INDEX (IDM) IN NORTH LAMPUNG REGENCY

By

M. Irfan Hammadi Ahadis

This study aims to analyze the performance and status of Village development Index (VDI) in North Lampung Regency during the period 2018-2023, to determine the factors that influence the VDI value, and to examine strategies that can be applied to have an impact on VDI in North Lampung Regency. This study uses a descriptive narrative method on VDI to determine the characteristics of VDI performance and status, conducts panel data regression analysis to test the effect of independent variables - village funds, village fund allocation, population density, and poor population - on VDI, and SWOT analysis to develop effective strategies for improving VDI. The results of the study show that VDI performance in several sub-districts has stagnated or declined.. Regression analysis shows that simultaneously all independent variables significantly affect VDI, with village fund allocation, population density, and poor population having a significant partial effect. Recommended strategies include improving human resources through training, optimizing digital technology-based village management, developing economic and tourism potential, improving supervision of the tourism sector, and improving village product development.

Keywords: Village development index, village fund, population density, poor population, village development strategy

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS MEMBANGUN
DESA (IDM) DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh:

M. Irfan Hammadi Ahadis

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama Mahasiswa : M. Irfan Hammadi Ahadis

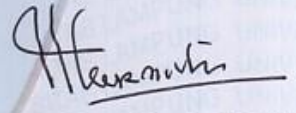
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120051003

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota

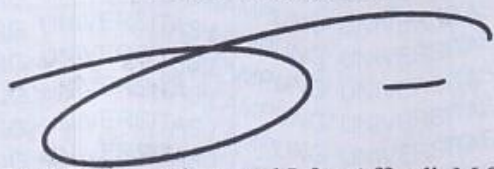
Fakultas : Program Pascasarjana Multidisiplin




Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP 196910031994031004


Prof. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.
NIP 196211201988032002

2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota
Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.

Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

Anggota : Dr. Novi Rosanti, S.P., M.E.P.

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Juni 2025

PERNYATAAN

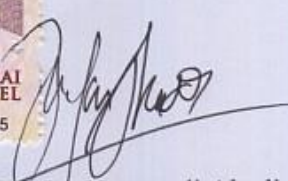
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,




M. Irfan Hammadi Ahadis
NPM 2120051003

RIWAYAT HIDUP

Penulis M. Irfan Hammadi Ahadis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si. dan Ibu drg. Meri Farida. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Bina Balita Islam pada tahun 2001, Sekolah Dasar (SD) Al Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2003-2009. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015. Penulis diterima di Jurusan Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri di Universitas Telkom pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Lampung.

MOTTO

“Selesaikan semua kegiatan yang sudah dimulai”

(Anonim)

“Bertikirlah untuk hal baik agar hasil yang didapatkan juga baik”

(Anonim)

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

(QS al-Anam: 162)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, tesis ini
kepersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan
dalam penyelesaian tesis ini selama penulis menempuh pendidikan di Magister
Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung.

Kedua adikku serta sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan kebahagiaan serta
motivasi selama penulis mengerjakan tesis ini.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, rezeki dan karunia-Nya yang
sangat melimpah dalam perjalanan hidup ini.

Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan
dapat menjadi inspirasi bagi yang membaca tesis ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Kabupaten Lampung Utara” dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini tidak dapat terealisasikan dan terwujud dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, nasihat dan sara yang membangun dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.
4. Bapak Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, saran, motivasi hingga semangat untuk penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak bertukar pikiran dan memberikan masukan dalam pengerjaan tesis.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.Si., selaku Dosen Penguji Utama atas saran, kritik hingga arahan yang diberikan untuk penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Dr. Novi Rosanti, S.P., M.E.P., selaku Dosen Penguji Anggota atas saran, kritik, dan arahan yang diberikan untuk perbaikan dalam penyelesaian tesis ini.

8. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Lampung yang senantiasa dengan sabar memberikan ilmu, berdiskusi dan memberikan nasihat serta seluruh staf/karyawan yang selalu dengan sabar memberikan bantuan.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr. Ir Hamartoni Ahadis, M.Si. dan Ibunda drg. Meri Farida yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, perhatian tanpa henti hingga motivasi penulis dalam menyelesaikan
10. Kedua adik yang sangat disayangi, Sarah Ramadhania Putri, S.T. dan M. Radhiya Amiryan Ahadis, S.T., yang selalu memberikan canda tawa, serta bahagia untuk penulis dalam penyelesaian tesis ini.
11. Kedua adik yang sangat disayangi, Sarah Ramadhania Putri, S.T. dan M. Radhiya Amiryan Ahadis, S.T., yang selalu memberikan canda tawa, serta bahagia untuk penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Sahabat serta kakak sepupu, Muhammad Aulia Rachman, S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi hingga ilmu yang tiada batas untuk penulis menyelesaikan tesis ini.
13. Sahabat-sahabat yang selalu senantiasa mendukung penulis, Septian Trisaputra, Wahyu Reza Pahlevi, Sahal Mustofa, M. Rizky Aditya, Bayak Djakasuria yang selalu memberikan motivasi untuk penulis menyelesaikan tesis.
14. Teman-teman mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung angkatan 2021 atas ilmu, canda tawa dan kenangan selama perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

M. Irfan Hammadi Ahadis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Pengembangan Wilayah	11
1.1 Modal Sosial	13
1.2 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	16
1.3 Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Desa	19
3. APBDesa.....	20
4. Dana Desa (DD)	24
5. Alokasi Dana Desa (ADD)	26
6. Kependudukan	28
7. Indeks Desa Membangun (IDM)	29
8. Analisis Data Panel.....	36
9. SWOT (<i>Streghts, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>).....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Penelitian	50
III. METODE PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian.....	53
B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional.....	53
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Metode Analisis	57

	Halaman
1. Analisis Tujuan Pertama	57
2. Analisis Tujuan Kedua	57
3. Analisis Tujuan Ketiga	66
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	68
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara.....	68
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	70
2. Letak dan Kondisi Geografis	72
3. Kondisi Kependudukan	74
4. Status Indeks Desa Membangun.....	77
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	85
A. Kinerja dan Status Indeks Desa Membangun	85
1. Kinerja Indeks Desa Membangun di Setiap Kecamatan	85
2. Kinerja dan Status Indeks Desa Membangun di Setiap Desa.....	90
B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Desa Membangun	128
1. Pemilihan Model Data Panel	177
2. Uji Asumsi Klasik	179
3. Uji Kelayakan Model.....	181
4. Interpretasi Faktor-Faktor Dalam Penelitian	186
C. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja dan Status Indeks Desa Membangun	191
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	198
A. Kesimpulan	198
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA.....	201
LAMPIRAN.....	207

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penduduk per kabupaten di Provinsi Lampung	4
2. Jumlah penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Lampung	5
3. Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung	6
4. Indeks desa membangun kabupaten di Provinsi Lampung	6
5. Peningkatan status desa Kabupaten Lampung Utara	7
6. Ranking nilai IDM Provinsi Lampung tahun 2018-2023	8
7. Klasifikasi Indeks desa membangun	30
8. Indikator nilai Indeks desa membangun	32
9. Penelitian terdahulu	45
10. Jenis dan sumber data penelitian	56
11. Daftar kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Utara	69
12. Luas dan persentase kecamatan hanya meliputi desa	70
13. Luas wilayah di setiap kecamatan	71
14. Ketinggian kecamatan dan jarak ke ibukota kabupaten	73
15. Gunung-gunung dan Sungai-sungai di Kabupaten Lampung Utara	74
16. Jumlah penduduk di setiap kecamatan	75
17. Kepadatan penduduk di setiap kecamatan	76
18. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara	76
19. Status indeks desa membangun di setiap kecamatan	78
20. Kinerja indeks desa membangun di setiap kecamatan	86
21. Selisih nilai kinerja IDM di kecamatan setiap tahun	89
22. Kinerja indeks desa membangun di setiap desa	91
23. Selisih kinerja IDM di desa setiap tahun	102
24. Status atau status IDM setiap desa	111
25. Jumlah status desa di setiap kecamatan tahun 2018-2023	123

Tabel	Halaman
26. Dana Desa di setiap desa periode tahun 2018-2023.....	130
27. Alokasi Dana Desa di setiap desa periode tahun 2018-2023	142
28. Kepadatan Penduduk di setiap desa periode tahun 2018-2023.....	153
29. Penduduk Miskin di setiap desa periode tahun 2018-2023.....	165
30. Hasil uji chow	178
31. Hasil uji hausman.....	178
32. Hasil Uji Fixed Effect Model penelitian	179
33. Hasil Uji Korelasi Fixed Effect Model penelitian.....	180
34. Nilai variabel tanpa transformasi logaritma	184
35. Nilai rata-rata, tertinggi dan terendah dana desa.....	187
36. Nilai rata-rata, tertinggi dan terendah alokasi dana desa	187
37. Faktor-faktor dalam metode SWOT	192
38. Matriks SWOT dampak terhadap indeks desa membangun	193
39. Hasil perhitungan Common Effect Model dengan e-views	208
40. Hasil perhitungan Fixed Effect Model dengan e-views.....	209
41. Hasil perhitungan Random Effect Model dengan e-views	210
42. Hasil perhitungan Uji Chow dengan e-views	211
43. Hasil perhitungan Uji Hausman dengan e-views.....	212
44. Olah data metode penelitian.....	213

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka penelitian	52
2. Matriks SWOT	67
3. Peta administrasi Kabupaten Lampung Utara.....	69
4. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2018	79
5. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2019	80
6. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2020	81
7. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2021	82
8. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2022	83
9. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2023	84
10. Grafik Residual	181
11. Hasil Uji Korelasi dengan e-views.....	212

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen keuangan Pemerintah melingkupi semua kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah pendapatan, masalah belanja, masalah penanganan kelebihan pendapatan di atas belanja (*surplus*) atau masalah kelebihan belanja di atas pendapatan (*defisit*) yang dikenal dengan masalah pembiayaan (Syachbrani & Yahya, 2018). Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha- usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Emarwati & Pujianto, 2022). Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat (Sumpeno, 2011). Pendapatan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, didapatkan dari pendapatan asli desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi dan lain-lain), alokasi anggaran pendapatan belanja dan negara, hasil pajak daerah dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) merupakan sebuah istilah dalam pengelolaan keuangan suatu desa setelah ditetapkan Undang-Undang Desa. Pengertian Dana Desa mulai digunakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011, didapatkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Indeks Desa Membangun seperti yang dijelaskan di dalam Buku yang berjudul “Indeks Desa Membangun” oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang di dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Indeks desa membangun dikembangkan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019.

Penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan suatu wilayah. Penduduk juga merupakan salah satu indikator dalam pengembangan wilayah untuk perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah tersebut. Penduduk yang berkualitas di dalam suatu wilayah akan berdampak terhadap beberapa sektor untuk perkembangan di wilayah tersebut seperti dapat menaikkan kesejahteraan yang ada di wilayah.

Wilayah yang akan dikembangkan, harus melakukan pendistribusian dana terhadap wilayah tersebut serta mempertimbangkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi (km^2). Kenaikan kepadatan penduduk dapat mempengaruhi pengembangan suatu wilayah karena kepadatan penduduk dalam suatu wilayah mempunyai pengaruh dalam kenaikan perekonomian. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengembangan di suatu wilayah adalah penduduk miskin. Penduduk miskin mempunyai dampak dalam pengembangan suatu wilayah karena penduduk miskin termasuk ke dalam indikator perhitungan untuk pengalokasian dari dana desa di setiap desa.

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten atau kota tertua di Provinsi Lampung yang ditetapkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1946 No. 304 serta Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956, Kabupaten Lampung Utara serta Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan menjadi kabupaten yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri dibawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Utara menjadi bagian dari Provinsi Lampung berdasarkan UU No. 14 Tahun 1964. Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan dan 247 desa serta kelurahan dengan rincian sebanyak 232 desa dan 15 kelurahan. Kabupaten Lampung Utara memiliki luas sebesar $2.725,63 \text{ km}^2$. Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistika (BPS), di tahun 2023 Provinsi Lampung terdiri dari total 13 kabupaten dan 2 kota dengan rincian sebanyak 229 kecamatan, 2.654 desa dan kelurahan, memiliki luas wilayah sebesar $33.575,41 \text{ km}^2$ serta jumlah penduduk sebanyak 9.269.110 jiwa yang tersebar di dalam 13 Kabupaten dan 2 Kota. Jumlah penduduk dari tahun 2018-2023 di Provinsi Lampung akan dijelaskan Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk per kabupaten di Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah Penduduk Kabupaten di Provinsi Lampung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LB	300.703	302.828	304.874	303.931	303.397	303.931
TGMS	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898	659.818
LS	1.002.285	1.011.286	1.019.789	1.071.727	1.081.115	1.090.174
LTIM	1.036.193	1.044.320	1.051.994	1.118.115	1.127.946	1.137.434
LTENG	1.271.566	1.281.310	1.290.407	1.477.395	1.500.022	1.522.426
*LU	507.376	492.217	511.827	512.686	532.757	540.511
WK	446.113	450.109	453.921	476.871	481.036	485.056
TUBA	445.797	450.902	455.891	427.152	431.208	431.623
PSWR	440.192	444.380	448.410	481.708	487.153	492.474
PRING	397.219	400.187	403.115	406.823	408.415	409.858
MSJ	199.168	200.198	200.999	229.772	232.685	235.546
TBB	271.206	273.215	274.905	287.707	289.620	291.437
PSB	153.743	154.895	155.883	165.937	164.816	165.937

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

*data tidak termasuk penduduk di kelurahan hanya meliputi penduduk di desa

Keterangan:

LU	: Lampung Utara	PRING	: Pringsewu
LTEN	: Lampung Tengah	WK	: Way Kanan
LS	: Lampung Selatan	PSWR	: Pesawaran
LTIM	: Lampung Timur	TBB	: Tulang Bawang Barat
LB	: Lampung Barat	PSB	: Pesisir Barat
TUBA	: Tulang Bawang	MSJ	: Mesuji
TGMS	: Tanggamus		

Berdasarkan Tabel 1, total penduduk dari 13 kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung di tahun 2023 adalah sebanyak 7.861.617 jiwa dengan 3 kabupaten yang memiliki penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Utara sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 540,511 jiwa. Pada periode 2018 hingga 2023, Provinsi Lampung mengalami penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya kecuali di tahun 2021 yang mengalami kenaikan. Walaupun penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami angka penurunan tetapi masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin di atas 100.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode tahun 2018-2023 akan dijelaskan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LB	40.620	39.050	38.120	39.360	36.200	34.730
TGMS	73.770	71.900	70.370	71.890	67.430	65.180
LS	148.530	144.440	143.330	145.850	136.210	133.670
LTIM	162.940	158.900	153.570	159.790	149.120	148.260
LTENG	160.120	153.840	152.280	155.770	143.340	140.290
*LU	147.832	139.744	135.322	126.499	121.809	114.561
WK	60.160	58.720	58.410	59.890	54.280	51.260
TUBA	43.100	42.060	42.430	44.530	39.190	37.830
PSWR	70.140	67.360	66.040	68.310	63.170	59.290
PRING	41.630	40.550	40.120	41.040	38.180	37.600
MSJ	15.010	14.940	14.720	15.240	13.880	13.710
TBB	21.930	21.140	20.290	23.030	20.720	20.320
PSB	22.980	22.380	22.240	23.230	21.850	21.450

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara

*data tidak termasuk penduduk di kelurahan hanya meliputi penduduk di desa.

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada tahun 2023, masih terdapat banyak kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin di atas 100.000 jiwa seperti Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan yang termasuk ke dalam kabupaten tertua, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Utara masih termasuk ke dalam kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi karena persentase penduduk miskin lebih tinggi. Persentase tinggi disebabkan oleh total jumlah penduduk yang rendah dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara serta persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara juga lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang serta Way Kanan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Tahun 2023, Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 55.000 jiwa. Lebih dari itu, hingga tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 40.000 jiwa. Angka persentase penduduk miskin di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung akan dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LB	13,508	12,895	12,504	12,950	11,932	11,427
TGMS	12,448	12,017	11,656	11,132	10,328	9,878
LS	14,819	14,283	14,055	13,609	12,599	12,261
LTIM	15,725	15,216	14,598	14,291	13,220	13,035
LTENG	12,592	12,006	11,801	10,544	9,556	9,215
*LU	29,137	28,391	26,439	24,674	22,864	21,195
WK	13,485	13,046	12,868	12,559	11,284	10,568
TUBA	9,668	9,328	9,307	10,425	9,088	8,765
PSWR	15,934	15,158	14,728	14,181	12,967	12,039
PRING	10,480	10,133	9,952	10,088	9,348	9,174
MSJ	7,536	7,463	7,323	6,633	5,965	5,821
TBB	8,086	7,737	7,381	8,005	7,154	6,972
PSB	14,947	14,448	14,267	13,999	13,257	12,927

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

*data tidak termasuk penduduk di kelurahan hanya meliputi penduduk di desa.

Selain persentase penduduk miskin yang tinggi, nilai indeks desa membangun Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2018-2023 termasuk rendah dan selalu menempati urutan bawah dari 13 Kabupaten. Dalam beberapa periode tahun, Kabupaten Lampung Utara memiliki nilai IDM di bawah dari kabupaten pemekaran. Nilai IDM Kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks desa membangun kabupaten di Provinsi Lampung

Kabupaten	Indeks Desa Membangun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LB	0,587	0,667	0,706	0,758	0,781	0,789
TGMS	0,563	0,605	0,658	0,671	0,689	0,708
LS	0,621	0,665	0,685	0,691	0,707	0,731
LTIM	0,616	0,643	0,656	0,665	0,695	0,715
LTENG	0,622	0,672	0,693	0,707	0,723	0,735
LU	0,583	0,613	0,636	0,646	0,668	0,673
WK	0,592	0,611	0,649	0,656	0,691	0,710
TUBA	0,580	0,636	0,654	0,669	0,689	0,701
PSWR	0,614	0,655	0,682	0,692	0,705	0,723
PRING	0,615	0,655	0,698	0,720	0,744	0,765
MSJ	0,598	0,636	0,660	0,674	0,692	0,711
TBB	0,610	0,651	0,659	0,674	0,698	0,722
PSB	0,569	0,602	0,610	0,644	0,664	0,674

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2023

Tabel 4. menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki nilai indeks desa membangun yang kecil, dan berada di urutan bawah jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah serta Lampung Selatan. Selain itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan nilai IDM Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan yang sedikit. Walaupun peningkatan nilai IDM sedikit, tetapi status desa setiap tahun mengalami perubahan di Kabupaten Lampung Utara. Status desa yang ada di dalam indeks desa membangun adalah 5 status yang terdiri dari Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri. Status desa juga didapatkan dari rata-rata nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di setiap desa yang ada di kabupaten. Tabel 5. menyajikan status desa di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Tabel 5. Peningkatan status desa Kabupaten Lampung Utara

Status	Indeks Desa Membangun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat Tertinggal	6	0	0	0	0	0
Tertinggal	155	105	45	25	2	0
Berkembang	69	120	170	184	194	189
Maju	2	7	17	23	36	43
Mandiri	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2023

Status desa sangat tertinggal sudah mengalami perubahan di tahun 2019 dengan memiliki status sangat tertinggal sebanyak 0 desa. Tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara masih belum memiliki status desa mandiri. Nilai yang harus diperoleh untuk mendapatkan status desa mandiri adalah sebesar $> 0,851$ dari rata-rata akumulasi nilai IKS, IKE dan IKL. Walaupun mengalami perubahan status desa setiap tahun, tetapi Kabupaten Lampung Utara masih jauh tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung. Ranking atau urutan nilai IDM kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung akan disajikan di Tabel 6.

Tabel 6. Ranking nilai IDM Provinsi Lampung tahun 2018-2023

No	Indeks Desa Membangun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	LTENG	LTENG	LB	LB	LB	LB
2	LS	LB	PRING	PRING	PRING	PRING
3	LTIM	LS	LTENG	LTENG	LTENG	LTENG
4	PRING	PRING	LS	PSWR	LS	LS
5	PSWR	PSWR	PSWR	LS	PSWR	PSWR
6	TBB	TBB	MSJ	MSJ	TBB	TBB
7	MSJ	LTIM	TBB	TBB	LTIM	LTIM
8	WK	MSJ	TGMS	TGMS	MSJ	MSJ
9	LB	TUBA	LTIM	TUBA	WK	WK
10	LU	LU	TUBA	LTIM	TGMS	TGMS
11	TUBA	WK	WK	WK	TUBA	TUBA
12	PSB	TGMS	LU	LU	LU	PSB
13	TGMS	PSB	PSB	PSB	PSB	LU

Sumber: Kementerian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2023

Periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2022, Kabupaten Lampung Utara selalu menempati urutan 12 dari 13 Provinsi dan hanya menempati urutan 10 pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Tahun 2023 Kabupaten Lampung Utara menempati urutan 13 dibawah Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan yang termasuk dalam kabupaten tertua di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara masih jauh dari status yang bagus karena Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah selalu menempati posisi lima besar setiap tahun. Kabupaten Lampung Utara selalu berada di bawah Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan dari tahun 2020-2023. Dengan hasil ranking pada Tabel 5, menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki nilai peningkatan indeks desa membangun yang kecil atau stagnan, hanya satu peringkat diatas dari kabupaten yang baru mekar dan tertinggal oleh peningkatan dari kabupaten-kabupaten yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka masalah-masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja dan status indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara pada periode tahun 2018-2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memberikan dampak terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja dan status indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara pada periode tahun 2018-2023.
2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara.
3. Mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk memberikan dampak terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat untuk pemerintah di Kabupaten Lampung Utara dapat memberikan saran serta informasi dalam merancang strategi yang dapat diterapkan untuk memberikan dampak terhadap indeks desa membangun serta strategi pengembangan desa-desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat untuk desa dapat memberikan pedoman atau bahan pertimbangan dalam rencana strategi peningkatan kinerja dan status desa terkait indeks desa membangun pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengembangan Wilayah

Pembangunan adalah usaha sadar manusia untuk menggunakan lingkungan demi memenuhi kebutuhannya sendiri (Putra, 2023). Pembangunan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi, 2009). Tujuan pembangunan dapat dicapai dengan berfokus pada berbagai isu antara lain (Putra, 2023):

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia.
- b. Memelihara daya dukung lingkungan.
- c. Mengontrol ekosistem dan spesies sebagai sumber daya pembangunan.
- d. Mengembangkan industri.
- e. Meramal krisis energi yang merupakan pilar utama industrialisasi

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu di mana kompone-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya (Rustiadi dkk., 2009). Suatu wilayah pada dasarnya bukan sekadar areal dengan batas-batas tertentu (Isard, 1975).

Konsep wilayah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut (Mahi, 2016):

a. Wilayah Homogen

Wilayah yang dipandang dari suatu aspek mempunyai sifat dan/atau ciri homogen seperti dalam hal ekonomi (struktur produksi atau pola konsumsi homogen), geografi (topografi atau iklim yang sama), agama, suku dan lain sebagainya.

b. Wilayah Nodal

Wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan daerah belakang (*hinterland*). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, komunikasi, dan transportasi.

Wilayah nodal digunakan untuk analisis ekonomi ruang, yang diartikan sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.

c. Wilayah Perencanaan

Wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dipandang sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja.

d. Wilayah Administratif

Wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten dan kecamatan.

e. Wilayah Pesisir

Wilayah yang daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat sampai dengan batas wilayah kecamatan pesisir.

Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antarwilayah (Mahi, 2016).

Pengembangan wilayah dapat dianggap sebagai suatu bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah (Rustiadi dkk., 2009). Pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya alam, manusia, dan teknologi (Mahi, 2016).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) melakukan resolusi yang dikenal sebagai ECOSOC (Economic and Social Council) 1582L, yang mengusulkan suatu arahan kebijakan dan tujuan pengembang wilayah (Rustiadi dkk., 2009).

Pengembangan wilayah adalah suatu instrumen potensial untuk integrasi dan promosi dari usaha pengembangan sosial dan ekonomi suatu negara yang sesuai dengan tujuan berikut (Rustiadi dkk., 2009):

- a. Merangsang perubahan struktural secara cepat dan reformasi sosial khususnya untuk meningkatkan distribusi pembangunan secara lebih luas pada kelompok masyarakat yang paling tertinggal:
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam menetapkan tujuan pembangunan dan di dalam proses pengambilan keputusan serta mengembangkan organisasi masyarakat.
- c. Menciptakan sistem kelembaan dan struktur administrasi serta pendekatan operasional untuk perencanaan pengembangan yang lebih efektif.
- d. Mencapai distribusi penduduk dan aktivitas masyarakat yang lebih baik melalui integrasi yang lebih efektif dari pengembangan kota dan desa.
- e. Memasukkan pertimbangan lingkungan secara lebih efektif dalam program-program pembangunan.

1.1 Modal Sosial

Modal sosial adalah gambaran kehidupan sosial yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1993). Modal sosial merupakan aspek sosial dan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilembagakan, yaitu keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun potensial terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui (Pierre Bourdieu, 1986). Modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 1999).

Modal sosial adalah kewajiban dan harapan, saluran-saluran informasi dan norma-norma sosial (Coleman, 1999). Komponen-komponen kunci dari modal sosial adalah keberadaannya merupakan prakondisi untuk pembangunan ekonomi dan sistem pemerintahan yang efektif (Putnam, 1993). Aspek utama dalam modal sosial diklasifikasikan menjadi empat aspek, yaitu hubungan saling percaya (*relations of trust*), adanya pertukaran (*reciprocity and exchanges*), aturan umum (*common rules*), norma-norma (*norms*) dan sanksi-sanksi (*sanctions*) serta keterkaitan (*connectedness*), jaringan (*networks*) dan kelompok-kelompok (*groups*) (Pretty dan Ward, 2001). Selanjutnya, komponen-komponen kunci dari model sosial adalah jaringan pertemuan (*networks of civic engagement*), norma-norma yang saling berinteraksi (*norms of generalized reciprocity*) dan *social trust* (Putnam, 1993). Aspek-aspek dalam modal sosial adalah sebagai berikut (Rustiadi dkk., 2009):

a. Hubungan Saling Percaya

Hubungan saling percaya (*trust*) pada dasarnya akan membangun kerjasama, yang kemudian dapat menekan biaya transaksi antara orang dan kemudian berarti menghemat penggunaan sumberdaya. Kepercayaan akan membangun rasa tanggung jawab dan dihargai, yang kemudian akan menimbulkan kepercayaan kepada yang memberikan kepercayaan, sehingga bersifat timbal balik.

b. Norma

Persetujuan timbal balik atau norma-norma yang efektif mengatur perilaku sedemikian rupa sehingga kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Keberadaan aturan umum, norma-norma dan sanksi-sanksi, membuat individu-individu percaya untuk berinvestasi pada aktivitas-aktivitas kolektif atau kelompok, dan percaya kepada orang lain akan melakukan hal yang sama. Aturan formal dibuat oleh pemegang otoritas, seperti produk-produk hukum dan peraturan, sementara aturan informal digunakan individu-individu untuk berbagai kegiatan individu dalam keseharian.

c. Jejaring (*Network*) dan Keterkaitan (*Linkage*)

Ciri-ciri penting dalam modal sosial di tingkat komunitas adalah otonomi dan keterkaitan (Woolcock, 1998). Untuk pihak pemerintah, sebenarnya keberadaan otonomi komunitas akan mendukung integritas organisasi dan membantu mencegah adanya tekanan oleh kelompok tertentu (Evans, 1995). Untuk masyarakat, adanya otonomi direfleksikan dengan adanya kekuatan (*power*) dan bentuk organisasi formal yang memungkinkan bertindak dan bebas dari tekanan pemerintah. Aspek keterkaitan (*linkage*) termasuk di dalamnya ikatan vertikal terhadap kekuatan luar dan ikatan horizontal antara pelaku-pelaku lokal.

Bentuk modal sosial dalam berupa horizontal atau hirarkial (Rustiadi dkk., 2009). Bentuk modal sosial yang horizontal dapat mendorong keterlibatan lebih banyak ikatan individual dalam komunitas dan membantu menghasilkan banyak kesetaraan (hubungan egaliter) dan mengembangkan struktur demokrasi yang lebih kuat (*robust*), sedangkan bentuk modal sosial hirarkial menghasilkan hubungan bersifat *patron-client* (dan kelompok-kelompok) yang justru dapat melemahkan pembangunan (Putnam, 1993). Modal sosial bisa tumbuh mulai di level individu, keluarga, komunitas, masyarakat lokal, masyarakat di suatu wilayah, nasional bahkan global (Rustiadi dkk., 2009). Tiga fungsi yang harus diberikan secara eksplisit dalam desain program di dalam pengembangan modal sosial adalah otonomi, *linkage* dan imbal hasil atas investasi (Rustiadi dkk., 2009). Program-program pemerintah akan sangat efektif dalam mendorong pengembangan modal sosial di tingkat komunitas ketika memandang partisipan adalah “produsen”, bukan klien dan mengembangkan struktur pendekatan intermediasi dan partisipatif (Rustiadi dkk., 2009). Keterkaitan juga penting dengan ikatan horizontal mendukung keterlibatan komunitas yang lebih luas, sedangkan keterkaitan vertikal memfasilitasi perubahan sistem, seperti dalam hal sistem akses ke sumberdaya, perubahan kebijakan, dan lain-lain (Rustiadi dkk., 2009).

1.2 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola (*governance*) merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan *stakeholder* (Asudazzaman, 2020). *Good governance* adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara (Sadjijono, 2007). Ada tiga pilar dari *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Santosa & Sarihati, 2024). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Syarat dari terciptanya *good governance* adalah sebagai berikut (Santosa & Sarihati, 2024):

a. Partisipatoris

Peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).

b. *Rule of Law*

Adanya perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.

c. Transparansi

Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang).

d. *Responsiveness*

Lembaga publik harus mampu memberikan respon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.

e. Konsensus

Penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat.

f. Persamaan Hak

Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

g. Efektivitas dan efisiensi

Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dan lain-lain

h. Akuntabilitas

Suatu kewajiban dari pemerintah untuk memperntanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi atau program-programnya.

Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat (Santosa & Sarihati, 2024). Menurut *Institute on Governance* yang dikutip Santosa (2008), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerangka kerja tim antar organisasi, departemen, dan wilayah.
- b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
- c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerja sama.
- d. Dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko dan berinisiatif.
- e. Pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan setiap tindak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional dan tidak memihak.

1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu orientasi tugas pokok pemerintah daerah yang ada di wilayahnya (Santosa & Sarihati, 2024).. Pemberdayaan adalah suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya (Santosa & Sarihati, 2024). Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah tentang memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya (Santosa & Sarihati, 2024). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek masukan atau *input* (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi), dari aspek proses (pelaksanaan, *monitoring* dan pengawasan serta dari aspek keluaran atau *output* (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi) (Santosa & Sarihati, 2024). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri termasuk kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Santosa & Sarihati, 2024).

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski jauh dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000). Pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian harus tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan agar tidak mengalami kemunduru lagi (Santosa & Sarihati, 2024).

2. Desa

Desa secara umum merupakan pemusatan penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan letaknya jauh dari kota (Hasugian dkk., 2022). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan lainnya (Nurman, 2015). Suatu wilayah pedesaan dengan luasan tertentu yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang mampu menciptakan perpaduan daya tarik wisata dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima kunjungan wisatawan, termasuk didalamnya kampung wisata karena keberadaannya di daerah kota (Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2013). Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto, 2011).

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya (Wasistiono dan Tahir, 2015). Desa atau udik menurut definisi universal merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rudal). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan aturan desa yang satu dengan desa yang lain (Bastian, 2015).

3. APBDesa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan umum disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan (Sumpeno, 2011). Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat (Sumpeno, 2011). Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Faradhiba & Diana, 2018). APBDesa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDesa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011).

Anggaran desa berfungsi sebagai:

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Penggunaan anggaran dapat diketahui dengan kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Unit-unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi ketika melakukan penyusunan anggaran. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisien anggaran.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.

Selain itu, manfaat dari anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV APBDesa Pasal 8, dijelaskan bahwa APBDesa terdiri atas 3 (tiga), yaitu

1. Pendapatan Desa.
2. Belanja Desa; dan
3. Pembiayaan Desa.

Selanjutnya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil aset, hasil usaha desa, swadaya desa, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh desa dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten. Dalam APBDesa yang termasuk sebagai pendapatan transfer adalah Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan desa yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat mengikat dan pendapatan desa lain-lain yang sah.

Belanja Desa Belanja desa merupakan semua jenis pengeluaran dari rekening desa yang jadi kewajiban desa dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah desa, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari dua jenis yaitu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pinjaman, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan.

4. Dana Desa (DD)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (*Buku Saku Dana Desa*, 2017). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (2) menjelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk.
2. Angka Kemiskinan.
3. Luas Wilayah.
4. Tingkat Kesulitan Geografis.

Tujuan dari Dana Desa menurut *Buku Saku Dana Desa* (2017) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Bab II Pasal 3 Ayat 2, dijelaskan bahwa dalam pengalokasian dana desa terdiri atas:

1. Alokasi Dasar sebesar 65% dari anggaran dana desa yang dibagikan secara proporsional kepada setiap desa.
2. Alokasi afirmasi sebesar 1% yang dibagikan secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Alokasi kinerja sebesar 4% yang dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik
4. Alokasi formula sebesar 30% yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi formula dibagikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk dengan bobot 10%.
2. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40%.
3. Luas wilayah desa dengan bobot 10%.
4. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%.

Rumus yang digunakan untuk perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z_1) + (0,40 \times Z_2) + (0,10 \times Z_3) + (0,40 \times Z_4)\} \times AF \text{ kab/kota.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi formula setiap desa.

Z_1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa.

Z_2 = Rasio angka kemiskinan setiap desa terhadap total penduduk miskin desa.

Z_3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa.

Z_4 = Rasio IKG setiap desa dengan total IKG desa

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah (Simanjuntak dan Hidayanto, 2002). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana alokasi dana desa (Widjaja, 2005). Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Nurcholis, 2011). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana desa adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup (Sahdan, 2004) :

- a) Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara.
- b) Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
- c) Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 Pasal 7, pengalokasian alokasi dana desa terdiri atas:

1. Alokasi dasar sebesar 65% dari total alokasi dana desa Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa.
2. Alokasi formula sebesar 35% dari total alokasi dana desa kabupaten dibagi berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan jumlah perangkat desa ditambah Badan Perangkat Desa (BPD) dan Rukun Tetangga (RT).

Alokasi dasar menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$W_1 = (ADDKab \times 0,65) / JDKab$$

Keterangan:

W_1 = Besaran alokasi dasar setiap desa
 $ADDKab$ = Pagu ADD Kabupaten Lampung Utara
 $JDKab$ = Jumlah desa di Kabupaten Lampung Utara

Alokasi formula dibagikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk desa dengan bobot 17,5%.
2. Luas wilayah desa dengan 17,5%.
3. Jumlah perangkat desa, BPD dan RT dengan bobot 65%.

Rumus yang digunakan untuk perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:

$$W_2 = [(0,175 \times Z_1) + (0,175 \times Z_2) + (0,65 \times Z_3)] \times (0,65 \times ADDKab)$$

Keterangan:

W_2	= Alokasi formula setiap desa.
Z_1	= Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa se Kabupaten Lampung Utara.
Z_2	= Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa se Kabupaten Lampung Utara.
Z_3	= Jumlah total perangkat desa, BPD dan RT se Kabupaten Lampung Utara.
ADDKab	= Pagu ADD Kabupaten Lampung Utara

6. Kependudukan

Demografi berasal dari Bahasa Yunani yang dapat dilihat asal katanya *demos* yang berarti penduduk dan *graphein* yang berarti menulis, yang jika digabungkan makna dari kata-kata tersebut adalah tulisan atau karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah (Marhaeni, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (1), yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistika (BPS), penduduk Indonesia adalah semua yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetapa di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). Kepadatan penduduk menurut definisi dari BPS adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan hidupnya (Alfiansyah dkk, 2022). Penduduk miskin menurut definisi oleh Badan Pusat Statistika adalah penduduk yang memiliki-rata-rata pengeluarn per kapita di bawah Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

7. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019 (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Indeks Desa Membangun menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Buku “Indeks Desa Membangun” oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi menjelaskan bahwa telah dikembangkan program unggulan berdasarkan tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Jaring Komunitas Wardesa

Jaring komunitas wardesa dapat dilakukan dengan cara memperkuat kualitas manusia serta memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga desa.

2. Lumbung Ekonomi Desa

Dengan cara mengembangkan potensi sumber daya di desa bisa dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. Lumbung Ekonomi Desa juga dapat dikapitasi yang memiliki nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

3. Lingkar Budaya Desa

Gerakan pembangunan desa berdasarkan lingkaran budaya desa harus dilakukan karena kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan perubahan secara kolektif. Pembangunan desa hendaknya melampaui panggilan pribadi.

Klasifikasi yang dijelaskan dalam indeks desa membangun terdapat lima (5) status, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri yang diklasifikasikan dari rentang skor 0,27 – 0,92. Klasifikasi dalam 5 status digunakan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Klasifikasi status Indeks Desa Membangun dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi Indeks desa membangun

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491 \text{ dan } \leq 0,599$
3	Berkembang	$> 0,599 \text{ dan } \leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707 \text{ dan } \leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$

Sumber: Buku Indeks Desa Membangun, 2015

Ketika penyusunan indeks desa membangun terdapat 3 (tiga) dimensi yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nilai, yaitu dimensi ketahanan sosial, dimensi ketahanan ekonomi dan dimensi ketahanan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut terdiri dari variabel dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk menghasilkan indeks desa membangun adalah sebagai berikut (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015):

1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya: skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Hal ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes, posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks:

$$\text{Indeks Variabel} : (\sum \text{Indikator X}) / (\text{Nilai Maksimum (X)})$$

Indikator-indikator yang disusun untuk menentukan nilai dari indeks desa membangun menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015) dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikator nilai Indeks desa membangun

No	Dimensi	Variabel	Indikator
1	KETAHANAN KESEHATAN SOSIAL	1 Pelayanan Kesehatan	1 Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit
			2 Tersedia tenaga kesehatan, bidan, dokter dan nakes lain
		2 Keberdayaan Masyarakat utk Kesehatan	3 Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
		3 Jaminan Kesehatan	4 Tingkat aktivitas posyandu
			5 Tingkat kepesertaan BPJS
		4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	6 Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI < 3 km
	PENDIDIKAN		7 Akses ke SMP/MTS < 6 km
			8 Akses ke SMU/SMK < 6 km
		5 Akses Pendidikan Non Formal	9 Kegiatan pemberantasan buta aksara
			10 Kegiatan PAUD
			11 Kegiatan PKBM/Paket ABC
		6 Akses Pengetahuan	12 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
	MODAL SOSIAL	7 Memiliki Solidaritas Sosial	13 Kebiasaan gotong royong di desa
			14 Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
			15 Ketersediaan fasilitas/lapangan olahraga
			16 Terdapat kelompok kegiatan olahraga
		8 Toleransi	17 Warga desa terdiri dari beberapa suku/etnis
			18 Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
			19 Agama yang dianut sebagian besar warga di desa

Tabel 8. Lanjutan

No	Dimensi	Variabel	Indikator
PERMUKIMAN	9	Rasa Aman Penduduk	20 Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan
			21 Partisipasi warga mengadakan siskamling
			22 Tingkat kejadian perkelahian massal di desa
			23 Penyelesaian/perdamaian perkelahian massal yang sering terjadi
	10	Kesejahteraan Sosial	24 Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
			25 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
			26 Terdapat Penduduk yang bunuh diri
	11	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	27 Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak
			28 Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
	12	Akses Sanitasi	29 Mayoritas penduduk desa memiliki jamban
			30 Terdapat tempat pembuangan sampah
	13	Akses ke Listrik	31 Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
	14	Akses Informasi dan Komunikasi	32 Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat
			33 Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
			34 Terdapat akses internet

Tabel 8. Lanjutan

No	Dimensi	Variabel		Indikator	
2	KETAHANAN EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat	35	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
		16	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	36	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
				37	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
		17	Akses Distribusi/Logistik	38	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
		18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	39	Tersedia lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
				40	Tersedianya BPR
				41	Akses penduduk ke kredit
		19	Lembaga Ekonomi	42	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
				43	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
		20	Keterbukaan Wilayah	44	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
				45	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
				46	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)

Tabel 8. Lanjutan

No	Dimensi	Variabel	Indikator
3	KETAHANAN LINGKUNGAN/ EKOLOGI	21 Kualitas Lingkungan	47 Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
			48 Terdapat sungai yang terkena limbah
		22 Potensi/Rawan Bencana Alam	49 Pencemaran air, tanah dan udara
			50 Kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran huta)
			51 Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)
			52 Upaya Antisipasi, Mitigasi bencana alam yang ada di desa

Sumber: Buku Indeks Desa Membangun, 2015

Ketiga dimensi tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam 22 variabel dan 52 indikator (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menentukan nilai dari indeks desa membangun di setiap desa. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks desa membangun di setiap desa adalah sebagai berikut:

$$IDM = (IKS + IKE + IKL)/3$$

Keterangan:

IDM = Indeks Desa Membangun
 IKS = Indeks Ketahanan Sosial
 IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
 IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan

8. Analisis Data Panel

Data Panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Basuki, 2021). Penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh (Widarjono, 2009). Pertama, data panel merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Keunggulan regresi data panel antara lain (Wibisono, 2005):

1. Untuk memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi data yang lebih informatif, variatif dan multikolinieritas.
4. Untuk mempelajari model-model perilaku yang lebih kompleks.

5. Untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

A. Pemilihan Model Data Panel

Metode estimasi regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Basuki, 2021):

1) *Common Effet Model*

Pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Saat menggunakan model ini, tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS).

2) *Fixed Effect Model*

Pendekatan model data panel ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersep. Teknik *Variable Dummy* digunakan dalam model ini untuk menangkap perbedaan intersep antar variabel. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3) *Random Effect Model*

Pendekatan model REM akan mengestimasi data panel variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Perbedaan intersep dalam model REM diakomodasikan oleh *error terms* masing-masing variabel. Keuntungan dalam menggunakan model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas dan model ini disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS).

Pengujian model yang paling tepat dapat dipilih dengan beberapa model pengujian, antara lain (Widarjono, 2009):

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian model yang menentukan untuk penggunaan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM).

Hipotesis yang digunakan dalam penggunaan Uji Chow adalah sebagai berikut (Basuki, 2021):

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_A : *Fixed Effect Model* (FEM)

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis yang digunakan dalam penggunaan Uji Hausman adalah sebagai berikut (Basuki, 2021):

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_A : *Fixed Effect Model* (FEM)

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel menggunakan *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Uji Lagrange Multiplier dilakukan jika hasil dari uji chow memilih CEM dan hasil dari uji hausman memilih REM (Basuki, 2021). Hipotesis yang digunakan dalam penggunaan Uji Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut (Basuki, 2021):

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_A : *Random Effect Model* (REM)

Menurut (Basuki, 2021), model umum yang digunakan dalam Regresi Data Panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_i = variabel dependen ke-i

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_p$ = Koefisien-koefisien variabel independen

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}, \dots, X_{pit}$ = variabel-variabel independen ke-i dengan parameternya

μ_i = residual (error) untuk pengamatan ke-i

t = Data *time series*
 i = Data *cross section*

B. Uji asumsi Klasik

1) Multikolinieritas

Model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linier yang sempurna (*perfect*) dan pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi (Frisch, 1934). Hubungan linier antar variabel bebas disebut dengan multikolinearitas (Kurniawan, 2016). Hubungan tersebut tercipta karena adanya korelasi antar variabel bebas, dimana setiap ada perubahan pada suatu variabel bebas, akan mengakibatkan variabel bebas lainnya berubah (Kurniawan, 2016). Dampak dari terjadinya multikolinearitas adalah tidak dapatnya dilakukan interpretasi, atau tidak dapatnya koefisien regresi untuk diestimasi (Kurniawan, 2016). Beberapa cara mendeteksi multikolinieritas adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi tetapi hasil uji t-statistik sangat sedikit variabel bebas yang signifikan secara statistik.
2. Menggunakan korelasi parsial.
3. *Tolerance and Variance Inflation Factor* (VIF).

Beberapa cara alternatif untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2016):

1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.

Pergantian ini harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menyebabkan variabel yang dikeluarkan merupakan variabel teoretis penting. Kondisi ini dikenal dengan sebutan *specification bias*.

2. Menambah jumlah observasi.

Jumlah data ditambahkan dengan harapan kolinearitas dapat berkurang karena terkadang sampel lain tidak memiliki kasus multikolinearitas yang serius.

3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference* dan *ratio transformation method*.

Namun harus diperhatikan bahwa dengan melakukan transformasi bukan berarti tidak menyebabkan masalah lain, seperti tidak terpenuhinya asumsi model regresi linear klasik, sampai terjadinya heteroskedastisitas.

2) Heteroskedastisitas

Tujuan dari tes heteroskedastisitas adalah untuk menganalisis model regresi dalam variansi akurabilitas pengamatan residual terhadap pengamatan lain (Basuki, 2021). Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Square*) (Kurniawan, 2016). Prinsip dari metode tersebut yaitu dengan menimbulkan jumlah kuadrat galat, atau biasa disebut dengan residual (Kurniawan, 2016).

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Kurniawan, 2016). Beberapa dampak yang diakibatkan oleh heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut (Kurniawan, 2016):

1. Heteroskedastisitas dapat merusak efisiensi estimator OLS.

Rusaknya sifat efisiensi estimator OLS tersebut menyebabkan hasil pengujian hipotesisnya menjadi meragukan.

2. Heteroskedastisitas merusak varians.

Varians yang dihasilkan cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang terkecil. Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan mengakibatkan uji hipotesis yang dilakukan juga tidak akan memberikan hasil yang baik (tidak valid). Selain itu, varians yang membesar juga mengakibatkan selang kepercayaan yang melebar.

C. Uji Kelayakan Model

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan model statistik (Kurniawan, 2016). Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan besar varian dalam suatu variabel yang ditentukan oleh satu atau lebih variabel lain dan nilai dari hubungan antara variabel dengan variabel lainnya (Basuki, 2021).

Koefisien determinasi berganda dinotasikan dengan R^2 (Kurniawan, 2016).

2) Uji Signifikansi Secara Bersama-sama atau Simultan

Uji simultan adalah uji semua variabel bebas secara keseluruhan dan bersamaan di dalam suatu model (Kurniawan, 2016). Uji ini dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika hasil uji simultannya adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (Kurniawan, 2016). Langkah-langkah pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut (Mona dkk. 2015):

- a. Menentukan formulasi hipotesis.
- b. Menentukan derajat kepercayaan 95 % ($\alpha = 0,05$).
- c. Menentukan signifikansi.
- d. Menarik kesimpulan.

3) Uji Secara Sebagian atau Parsial

Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya (Kurniawan, 2016). Hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen yang diuji tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya (Kurniawan, 2016).

9. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

SWOT adalah akronim dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif (Fahmi, 2019). Pengertian masing-masing dari kata SWOT adalah sebagai berikut (Istiqomah dan Irsad, 2017):

a. *Strength* (Kekuatan)

Situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Situasi internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.

c. *Opportunity* (Peluang)

Situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Misal, ada segmen pasar tertentu yang belum dimasuki pemain lain, secara umum akan menjadi peluang bagi organisasi manapun yang berhasil melihat pasar tersebut (Tripomo, 2005).

d. *Threat* (Ancaman)

Suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/ dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

Analisa SWOT akan mendapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan (Alma, 2017).

Penggunaan metode SWOT memiliki matriks SWOT yang akan digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam pengembangan suatu studi kasus. Matriks SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas tentang peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Istiqomah dan Irsad, 2017). Hasil yang harus didapatkan adalah melihat perbandingan antara strategi kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman dapat dilakukan dengan menggunakan metode IFAS dan EFAS.

IFAS merupakan singkatan dari *Internal Strategic Factor Analysis Summary*. EFAS adalah singkatan dari *External Strategic Factor Analysis Summary*. IFAS adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka *Strengths* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan EFAS adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka *Opportunity* (Kesempatan) dan *Threat* (Ancaman). Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi /perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi /perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T (Freddy Rangkuti, 2015). Matriks SWOT (Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman) merupakan alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan empat

tipe strategi, yaitu SO (*strengths-opportunities*), WO (*weakness-opportunities*), ST (*strengths-threats*), dan WT (*weaknesses-threats*) (Amalia, 2017).

Pengertian dari strategi yang terdapat di dalam Matriks SWOT adalah sebagai berikut (Fatimah, 2020):

a. Strategi SO

Strategi yang diterapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi WO

Strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.

c. Strategi ST

Strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai perbandingan dan acuan dasar dalam memperoleh informasi yang dapat dijadikan tambahan informasi dalam penelitian saat ini. Penelitian terdahulu mempunyai lingkup tentang variabel yang dapat mempengaruhi indeks desa membangun dalam pengembangan suatu wilayah. Penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dalam kriteria lokasi, variabel yang digunakan hingga metode yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks desa membangun di wilayah Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2018-2023 dengan 232 desa sebagai objek penelitian. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam variabel yang digunakan, waktu dan tempat penelitian hingga metode yang digunakan akan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Iftitah, Wibowo (2022)	Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa	Menganalisis pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan alokasi dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di 121 desa di Kabupaten Gowa selama periode tahun 2017-2018.	Analisis Regresi Data Panel	Penggunaan dana desa untuk belanja penyetoran model BUMDes secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM dan PADes secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa. Sementara itu, untuk variabel alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM. Dalam penelitian ini, terdapat implikasi untuk perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa.

Tabel 9. Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2	Halim, Taryani (2023)	Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur	Menganalisis dampak dana desa sebagai suatu kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan desa.	Analisis Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyerapan dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM, tetapi persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa dengan <i>lag</i> waktu dua dan tiga tahun memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM yang membuktikan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua hingga tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan
3	Salmah (2022)	Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Peningkatan Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Polokarto Tahun 2016-2021	Mengestimasi dampak dana desa terhadap Indeks Desa membangun (IDM) dan tingkat kesejahteraan di Kecamatan Polokarto Pada Tahun 2016-2021.	Analisis Regresi Data Panel	Hasil penelitian ditemukan bahwa secara simultan dana desa berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) dan Kesejahteraan di Kecamatan Polokarto Pada Tahun 2016-2021

Tabel 9. Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Otheliansyah, Hizwar (2023)	Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi Terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan jumlah desa mandiri dari kemiskinan desa di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.	Hasil yang didapatkan adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan peningkatan jumlah desa mandiri mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.
5	Aji, Qibthiyyah (2023)	Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dampak dari dana desa terhadap perkembangan status desa yang disesuaikan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD).	Penelitian ini menggunakan metode <i>First Difference</i> .	Hasil dari penelitian ini adalah dana desa berdampak secara parsial signifikan terhadap perkembangan status desa, tetapi koefisien regresi yang didapatkan menunjukkan angka yang kecil dalam perekonomian.
6	Tambunan, Sihombing, Harahap (2020)	Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	Mendeskripsikan peranan dana desa dalam pengembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Deli Serdang.	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah menggambarkan keadaan desa sebelum terdapat dana desa dan setelah terdapat dana desa serta peranan dana desa dalam pengembangan Indeks Desa Membangun.

Tabel 9. Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	Qudri, (2023)	Sari Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di 23 Kabupaten atau Kota Provinsi Aceh	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan yang terdapat di 23 Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan data dari tahun 2016 hingga tahun 2022.	Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel terpilih yaitu <i>Random Effect Model</i> (REM).	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penduduk miskin, PDRB memiliki pengaruh positif sedangkan untuk IPM mempunyai pengaruh negatif yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Aceh.
8	Suhyanto (2022)	Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dari Dana Transfer, Dana Desa dan PAD terhadap IPM serta menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh total paling tinggi terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat.	Metode yang digunakan adalah metode Analisis Regresi Data Panel dengan model <i>fixed effect</i> .	Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel dari Dana Transfer, DD hingga PAD mempunyai pengaruh terhadap peningkatan IPM dan pengaruh paling tinggi adalah Dana Transfer.

Tabel 9. Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	Sihombing, Arsani, Angraini, Pratiko (2022)	Implementasi Model SEM Pada Hubungan IPM, IPD dan IDM	Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari IPM, kemiskinan dan DD terhadap pembangunan dengan desa dengan menggunakan IPD dan IDM dan BPS pada tahun 2018.	Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis <i>Struktural Equation Model</i> (SEM).	Hasil penelitian menunjukkan bawah DD belum berpengaruh langsung terhadap IPD dan IDM, kemiskinan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap IPD dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap IDM sedangkan IPM berpengaruh secara signifikansi positif terhadap IPD dan tidak langsung terhadap IDM
10	Ekawati, Agustar, Analia (2022)	Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)	Mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui implikasinya terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.	Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan memilih 3 desa yang tingkat kemajuannya berbeda sebagai kasus. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan dana desa mulai dari perencanaan penggunaan sampai dengan pelaporan penggunaan belum menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Aspek penggunaan secara tertib dengan rencana strategis Nagari sering kurang diperhatikan. Implikasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap IDM telah memberikan dampak positif pada Nagari.

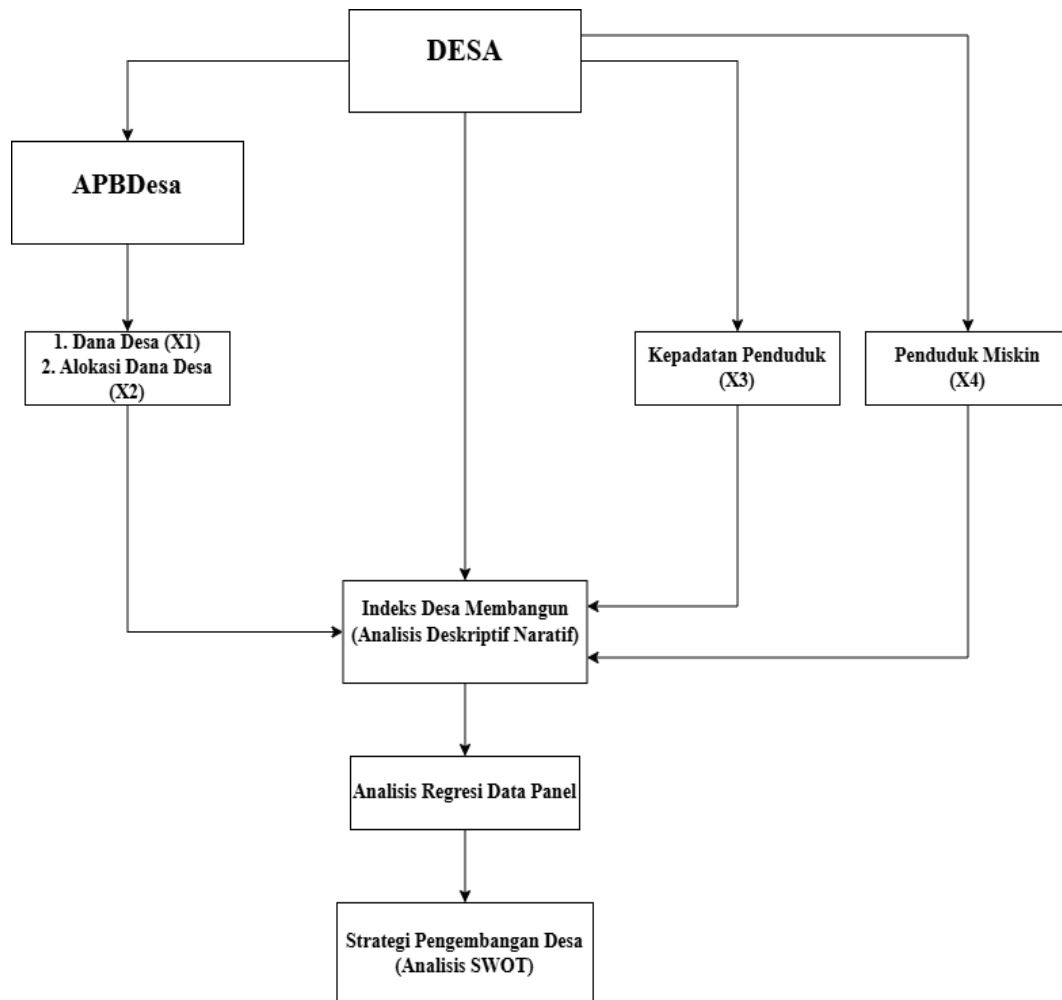
C. Kerangka Penelitian

Indeks Desa Membangun dikembangkan sesuai dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 hingga tahun 2019. Indeks Desa Membangun mempunyai beberapa dimensi yaitu, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan. Indeks desa membangun dikembangkan dengan harapan harus mampu menjangkau seluruh dimensi kehidupan di desa dengan aspek dimensi yang telah disebutkan. Indeks desa membangun juga diharapkan dapat membantu pengembangan di suatu desa sehingga desa tersebut dapat menjadi desa mandiri. Dari tahun 2018 hingga tahun 2023, hanya terdapat 1 kecamatan dari 23 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara yang memiliki status sebagai kecamatan Maju. Kecamatan tersebut dapat dikatakan kecamatan dengan status maju dihitung dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Tahun 2021, terdapat 2 kecamatan yang memiliki status sebagai kecamatan tertinggal. Beberapa kecamatan lainnya juga mengalami perubahan atau peningkatan status dari kecamatan tertinggal hingga menjadi kecamatan berkembang.

Tahun 2023, sebanyak 22 kecamatan lainnya mempunyai status sebagai kecamatan berkembang dengan rentan nilai yang berbeda. Walaupun sebanyak 22 kecamatan mengalami perubahan status menjadi kecamatan berkembang dan sebanyak 1 kecamatan mengalami perubahan status menjadi maju, akan tetapi dalam beberapa kecamatan masih terdapat beberapa desa yang dapat dikategorikan sebagai desa berkembang bahkan beberapa desa masih dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, kepadatan penduduk dan penduduk miskin terhadap indeks desa membangun di setiap desa yang berada di dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Dari data realisasi dana desa, alokasi dana desa, kepadatan penduduk dan penduduk miskin serta indeks desa membangun akan disusun dan dikelompokkan setiap tahunnya berdasarkan desa di kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Data-data yang telah disusun akan dianalisis dengan metode deskriptif naratif untuk mengetahui kinerja dan status indeks desa membangun di setiap desa di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui status dari desa-desa yang sudah mengalami peningkatan status, mengalami peningkatan status yang kecil atau bahkan stagnan hingga untuk mengetahui desa-desa yang mengalami perubahan dari status indeks desa membangun di setiap tahunnya.

Selanjutnya, data dari dana desa, alokasi dana desa, kepadatan penduduk dan penduduk miskin akan dilakukan perhitungan menggunakan metode analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap indeks desa membangun selama tahun 2018 hingga 2023. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode tersebut, hasil dari perhitungan akan dianalisis untuk selanjutnya menyusun strategi yang akan digunakan untuk memberikan dampak terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara. Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan strategi SWOT. Penggunaan strategi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap nilai indeks desa membangun serta pengembangan di wilayah Kabupaten Lampung Utara terutama di desa-desa yang masih berada di status berkembang hingga menjadi maju bahkan mandiri. Gambar 1 akan menunjukkan alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi indeks desa membangun (IDM) di Wilayah Kabupaten Lampung Utara

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode deskriptif naratif pada indeks desa membangun. Selanjutnya, data-data yang diteliti akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Data dikumpulkan, selanjutnya dirurutkan sesuai dengan tahun dan desa dalam wilayah tersebut. Setelah diketahui hubungan yang terdapat antara variabel, maka dilakukan metode SWOT untuk memberikan strategi yang tepat untuk memberikan dampak terhadap indeks desa membangun wilayah Kabupaten Lampung Utara.

B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional pada penelitian ini mencakup pengertian yang akan digunakan untuk menunjang dan menciptakan data akurat yang selanjutnya akan dianalisis dengan tujuan penelitian. Konsep dasar digunakan untuk menjelaskan tentang karakteristik dari sesuatu masalah yang akan diteliti.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini untuk Dana Desa adalah Rupiah (Rp) untuk setiap tahunnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perpanjangan dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penelitian ini, Alokasi Dana Desa menggunakan nilai satuan Rupiah (Rp) dalam setiap tahunnya.

Kepadatan penduduk adalah suatu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan di wilayah tertentu. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Pentingnya analisis dari kepadatan penduduk adalah untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Dalam penelitian ini, kepadatan penduduk didapatkan dari luas wilayah yang mempunyai satuan kilometer dan jumlah penduduk. Satuan kepadatan penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah kilometer/jumlah penduduk atau $\text{km}^2/\text{jumlah penduduk}$.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki-rata-rata pengeluarnya per kapita di bawah Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Satuan penduduk miskin dalam penelitian ini adalah penduduk miskin.

Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. Nilai dari indeks desa membangun didapatkan dari perhitungan indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 22 variabel, 52 indikator dan akan menentukan status dari desa di setiap kecamatan yang akan disebut dengan klasifikasi desa.

Data Panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data panel mempunyai keunggulan, yaitu mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar, dan dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Variabel dependen pada penelitian adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Kepadatan Penduduk (KP) dan Penduduk Miskin (PM).

SWOT adalah akronim dari *streghts* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Utara yang memiliki kecamatan sebanyak 23 kecamatan dan terdiri dari 247 desa dan kelurahan dengan rincian desa sebanyak 232 dan kelurahan sebanyak 15. Pada penelitian ini, hanya difokuskan terhadap desa yang terdapat di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.

Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Lampung bahkan sejak Provinsi Lampung masih bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Utara memiliki nilai indeks desa membangun yang kecil dibandingkan dengan kabupaten lain. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Juni tahun 2023 hingga bulan Agustus tahun 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka serta dokumen lain sebagai dasar atau landasan dasar dari penelitian ini serta data terkait dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), kepadatan penduduk (KP) dan penduduk miskin (PM) dari wilayah Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2018 hingga tahun 2023 pada unit terhadap desa. Kebutuhan dan sumber data akan dijelaskan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jenis dan sumber data penelitian

No	Data	Jenis Data	Sumber Data
1	Dana Desa	Sekunder	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Kabupaten Lampung Utara
2	Alokasi Dana Desa	Sekunder	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Kabupaten Lampung Utara
3	Kepadatan Penduduk	Sekunder	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Kabupaten Lampung Utara
4	Penduduk Miskin	Sekunder	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Kabupaten Lampung Utara
5	Indeks Desa Membangun	Sekunder	1. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deksriptif naratif untuk mengetahui status indeks desa membangun (IDM) desa, selanjutnya menggunakan alat analisis regresi data panel dan menggunakan metode SWOT.

1. Analisis Tujuan Pertama

Analisis pertama yang dilakukan adalah deksriptif naratif yang dilakukan untuk mengetahui kinerja dan status indeks desa membangun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Setelah itu, analisis kinerja dan status dari indeks desa membangun di desa-desa. Analisis ini dilakukan dengan cara mengurutkan status indeks desa membangun yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan dari kinerja dan status yang dilakukan di penelitian ini adalah melihat perubahan dari kinerja atau status indeks desa membangun. Perubahan dari indeks desa membangun tersebut meliputi peningkatan status indeks desa membangun, penurunan status dan stagnasi status, peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dari peningkatan yang besar, kecil atau bahkan stagnan.

2. Analisis Tujuan Kedua

Analisis regresi data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, kepadatan penduduk dan penduduk miskin terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara. Pada penelitian ini, analisis regresi data panel menggunakan perhitungan melalui aplikasi *software e-views*. Model umum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_i	= variabel dependen ke-i
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_p$	= Koefisien-koefisien variabel independen
$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}, \dots, X_{pit}$	= variabel-variabel independen ke-i dengan parameternya
μ_i	= residual (error) untuk pengamatan ke-i
t	= Data <i>time serie</i>
i	= Data <i>cross section</i>

Pada penelitian ini, model penduga dari analisis regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \alpha + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

IDM_{it}	= Indeks Desa Membangun
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien
DD_{it}	= Dana Desa (Variabel independen ke-1, Rp)
ADD_{it}	= Alokasi Dana Desa (Variabel independen ke-2, Rp)
KP_{it}	= Kepadatan Penduduk (Variabel independen ke-3, km ² /jumlah penduduk)
PM_{it}	= Penduduk Miskin (Variabel independen ke-4, Penduduk miskin)
i	= Wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara
t	= 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
u	= Error
$\log$	= Operasi logaritma

A. Pemilihan dan Pengujian Model Data Panel

1) Pemilihan Model Data Panel

Penentuan model estimasi terbaik dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. *Common Effect Model* (CEM)

Pendekatan *common effect model* merupakan pendekatan yang paling sederhana. Pendekatan ini menggabungkan data dari data *time series* dan data dari *cross section*.

Asumsi yang digunakan adalah perilaku antar individu sama dalam kurun waktu yang ditentukan (Basuki, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam model ini menggunakan *ordinary least square* (OLS). Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \alpha + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

IDM_{it}	= Indeks Desa Membangun
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien
DD_{it}	= Dana Desa (Variabel independen ke-1, Rp)
ADD_{it}	= Alokasi Dana Desa (Variabel independen ke-2, Rp)
KP_{it}	= Kepadatan Penduduk (Variabel independen ke-3, km ² /jumlah penduduk)
PM_{it}	= Penduduk Miskin (Variabel independen ke-4, Penduduk miskin)
i	= Wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara
t	= 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
u	= Error
$\log$	= Operasi logaritma

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model FEM ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu dan dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya (Basuki, 2021). Model estimasi ini menggunakan analisis *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) (Basuki, 2021). Persamaan model FEM adalah sebagai berikut:

$$IDM_{it} = (\alpha + i\alpha_{it}) + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + u_{it}$$

c. Random Effect Model (REM)

Perbedaan dengan model FEM, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati (Basuki, 2021).

Model ini juga sering disebut dengan *error component model* (ECM). Model ini memiliki persamaan sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + u_{it}$$

Dengan menggunakan asumsi bahwa β_{0i} merupakan variabel random sehingga intersep dari masing-masing *cross section* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\beta_{0i} = \beta_0 \varepsilon_i$$

Substitusi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IDM_{it} &= (\beta_0 + \varepsilon_i) + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + u_{it} \\ IDM_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + (u_{it} + \varepsilon_i) \\ IDM_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \log (DD)_{it} + \beta_2 \log (ADD)_{it} + \beta_3 \log (KP)_{it} + \beta_4 \log (PM)_{it} + w_{it} \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} w_{it} &= u_{it} + \varepsilon_i \\ \varepsilon_i &= \text{komponen error dari data } cross\text{-}section \\ u_{it} &= \text{kombinasi komponen } cross\text{-}section \text{ dan } time \text{ series} \end{aligned}$$

2) Pengujian Model Data Panel

Pengujian model data panel dilakukan untuk menentukan model terbaik. Uji yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dengan cara sebagai berikut:

a) Menentukan hipotesis

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_A : *Fixed Effect Model* (FEM)

b) Menentukan nilai signifikansi (α) sebesar 5 % atau 0,05

c) Menentukan kriteria.

H_0 : diterima apabila nilai $p > (\alpha)$

H_A : diterima apabila nilai $p < (\alpha)$

d) Kesimpulan

Menurut Baltagi (2005), rumus uji statistik uji chow adalah sebagai berikut:

$$F_{hit} = \frac{(RRRS - URRS)/(N-1)}{(URRS)/(NT-N-K)}$$

Keterangan:

F_{hit} = F hitung

$RRRS$ = *Restricted residual sum of squares* dari model CEM

$URRS$ = *Unrestricted residual sum of squares* dari model FEM

N = Jumlah unit *cross-section*

T = Jumlah periode waktu

K = Jumlah parameter tanpa intersep

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* dengan cara sebagai berikut:

a) Menentukan hipotesis

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_A : *Fixed Effect Model* (FEM)

b) Menentukan nilai signifikansi (α) sebesar 5 % atau 0,05

c) Menentukan kriteria.

H_0 : diterima apabila nilai $p > (\alpha)$

H_A : diterima apabila nilai $p < (\alpha)$

d) Kesimpulan

Menurut Greene (2018), rumus uji statistik untuk uji hausman adalah sebagai berikut:

$$H = [\beta_{FEM} - \beta_{REM}] = \sum^{-1} [\beta_{FEM} - \beta_{REM}] X^2_{(k)}$$

Keterangan:

β_{FEM} = Vektor estimasi *slope fixed effect model*

β_{REM} = Vektor estimasi *slope random effect model*

Σ^{-1} = Estimasi matriks invers varians-kovarians dari $(\beta_{FEM} - \beta_{REM})$

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan jika dalam uji chow yang diterima adalah CEM dan dalam uji hausman yang diterima adalah REM.

Uji Lagrange digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* dengan cara sebagai berikut:

a) Menentukan hipotesis

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_A : *Random Effect Model* (REM)

b) Menentukan nilai signifikansi (α) sebesar 5 % atau 0,05

c) Menentukan kriteria.

H_0 : diterima apabila nilai $p > (\alpha)$

H_A : diterima apabila nilai $p < (\alpha)$

d) Kesimpulan

Menurut Greene (2018), rumus uji statistik untuk uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut:

$$BP - LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N [\sum_{t=1}^T u_{it}]^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T u_{it}^2} - 1 \right]^2 X^2_1$$

Keterangan:

u_{it} = Residual *common effect model*

N = Jumlah unit *cross-section*

T = Jumlah periode waktu

B. Uji Asumsi Klasik

1) Multikolineritas

Uji Multikolineritas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik.

Regresi yang baik tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas.

Rule of thumb dari uji multikolinearitas adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi $> 0,85$, maka dapat dikatakan terjadinya multikolineritas dalam model (Basuki, 2021). Pada penelitian ini, uji multikolineritas digunakan untuk melihat korelasi antar variabel bebas yang terdapat di dalam model regresi. Dengan menggunakan *software eviews*, dapat melihat korelasi antara variabel dengan batasan $< 0,85$ untuk setiap variabelnya.

2) Heteroskedastisitas

Model regresi dapat dikatakan model yang baik adalah model yang mempunyai homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas akan menggunakan grafik residual dengan menggunakan *software eviews*. Variabel-variabel dilihat pola atau pembentukan pola dari datanya dan dengan batasan antara 500 hingga -500 dengan menggunakan *software eviews* dan akan dibandingkan dengan batas nilai signifikansi yang telah ditentukan.

C. Uji Kelayakan Model

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi atau *R-Square* adalah suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. *Adjusted R-Square* adalah nilai koefisien determinasi terkoreksi yang menyesuaikan R^2 dengan cara membagi tiap *sum of square* dengan derajat bebasnya masing-masing (Kurniawan, 2016). Pada penelitian ini, nilai yang digunakan sebagai acuan nilai pengaruh terhadap variabel independen adalah nilai dari *Adjusted R-Square*.

2) Uji Signifikansi Secara Bersama-sama atau Simultan

Uji F atau Uji Simultan digunakan untuk mencari pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji Simultan akan ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi (*sig*). Selanjutnya, taraf atau tingkatan signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_i = 0$; artinya tidak memiliki pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen secara bersamaan.

$H_a : \text{minimal terdapat satu nilai } b_i \neq 0$; artinya memiliki pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen secara bersamaan.

Keterangan:

H_0 = Hipotesis nol

H_a = Hipotesis Alternatif

I = 1, 2, 3, 4

Ketentuan pengambilan kesimpulan uji simultan pada penelitian ini adalah:

- a) Jika nilai nilai F hitung $> F$ tabel atau jika nilai probabilitas *sig.* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel independen atau dana desa (X_1), alokasi dana desa (X_2), kepadatan penduduk (X_3) dan penduduk miskin (X_4) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau indeks desa membangun (Y).
- b) Jika nilai nilai F hitung $< F$ tabel atau jika nilai probabilitas *sig.* $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, variabel independen atau dana desa (X_1), alokasi dana desa (X_2), kepadatan penduduk (X_3) dan penduduk miskin (X_4) tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau indeks desa membangun (Y).

3) Uji Secara Sebagian atau Parsial (Uji T)

Uji secara parsial atau Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, tingkatan yang digunakan adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Pada uji secara parsial, cara yang digunakan juga dapat menggunakan perbandingan dengan nilai *sig.* atau nilai *t* hitung dengan *t* tabel. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_i = 0$; artinya tidak mempunyai pengaruh secara tunggal terhadap variabel dependen

$H_a : b_i \neq 0$; artinya variabel secara tunggal memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

Keterangan:

H_0 = Hipotesis nol

H_a = Hipotesis Alternatif

i = 1, 2, 3, 4

Selanjutnya, untuk hipotesis alternatif (H_a) akan dijelaskan pada masing-masing hipotesis dibawah ini:

- a) H_1 atau hipotesis pertama terdapat pengaruh dana desa (X_1) terhadap indeks desa membangun (Y).
- b) H_2 atau hipotesis kedua terdapat pengaruh alokasi dana desa (X_2) terhadap indeks desa membangun (Y).
- c) H_3 atau hipotesis ketiga terdapat pengaruh kepadatan penduduk (X_3) terhadap indeks desa membangun (Y).
- d) H_4 atau hipotesis keempat terdapat pengaruh penduduk miskin (X_4) terhadap indeks desa membangun (Y).

Selanjutnya, dengan menggunakan perbandingan nilai *sig.*, maka ketentuan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai nilai *t* hitung $> t$ tabel atau jika nilai probabilitas *sig.* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- b) Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau jika nilai probabilitas sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Analisis Tujuan Ketiga

Analisis tujuan ketiga dilakukan berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dari kedua analisis sebelumnya. Metode yang akan digunakan dalam analisis tujuan ketiga adalah menggunakan metode SWOT. Ketika menggunakan analisis SWOT, dapat dilihat perbandingan antara strategi kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman dapat dilakukan dengan menggunakan metode IFAS dan EFAS. IFAS merupakan singkatan dari *Internal Strategic Factor Analysis Summary*, sedangkan untuk EFAS adalah *External Strategic Factor Analysis Summary*. *Internal Strategic Factor Analysis Summary* (IFAS) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka *Strengths* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan). *External Strategic Factor Analysis Summary* (EFAS) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka *Opportunity* (Kesempatan) dan *Threat* (Ancaman). Setelah hasil dari analisis tujuan pertama dan kedua diketahui, selanjutnya adalah menganalisis hasil tersebut dengan menggunakan Matriks SWOT. Matriks SWOT ini digunakan untuk memudahkan dalam analisis dan pengambilan keputusan terhadap strategi yang memberikan dampak terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara. Matriks SWOT yang akan digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan oleh Gambar 2.

	<i>Strenght</i>	<i>Weakness</i>
<i>Threat</i>		
<i>Oppurtunity</i>		

Gambar 2. Matriks SWOT

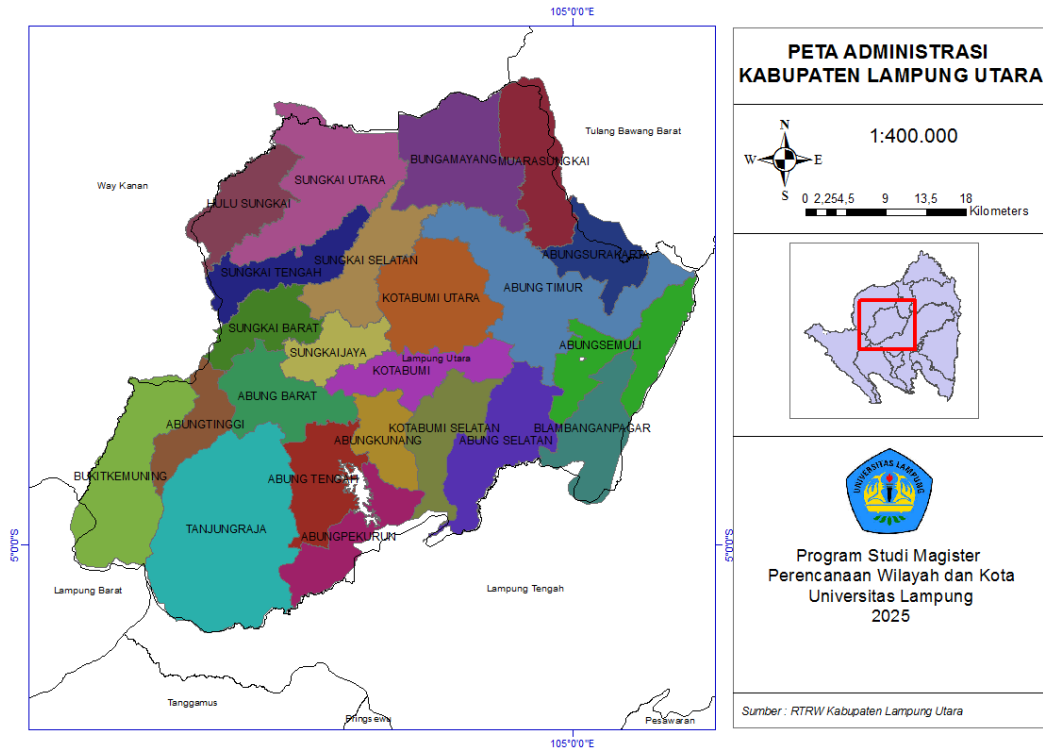
Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara terbentuk pada tanggal 15 Juni 1946 berdasarkan dari Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia No. 304. Kabupaten Lampung Utara menjadi bagian dari Provinsi Lampung berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung. Kabupaten Lampung Utara mengalami pemekaran wilayah sebanyak tiga kali. Pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Utara yang pertama membentuk Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 1991. Pemekaran kedua membentuk Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Pemekaran wilayah terakhir membentuk Kabupaten Way Kanan berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1999.

Kabupaten Lampung Utara memiliki sebanyak 23 kecamatan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi 23 kecamatan dengan rincian kecamatan yang baru dibentuk adalah Kecamatan Hulu Sungkai, Sungkai Tengah, Abung Pekurun, Sungkai Jaya, Sungkai Barat, Abung Kunang dan Blambangan Pagar. Peta administrasi di wilayah Kabupaten Lampung akan dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 3. Peta administrasi Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara mempunyai 23 kecamatan dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Kotabumi serta dengan rincian sebanyak 232 desa dan 15 kelurahan. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung termasuk kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Daftar kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Utara

No	Kecamatan	No	Kecamatan	No	Kecamatan
1.	Bukit Kemuning	9.	Kotabumi Utara	17.	Hulu Sungkai
2.	Kotabumi	10.	Kotabumi Selatan	18.	Sungkai Tengah
3.	Sungkai Selatan	11.	Abung Tengah	19.	Abung Perkurun
4.	Tanjung Raja	12.	Abung Tinggi	20.	Sungkai Jaya
5.	Abung Timur	13.	Abung Semuli	21.	Sungkai Barat
6.	Abung Barat	14.	Abung Surakarta	22.	Abung Kunang
7.	Abung Selatan	15.	Muara Sungkai	23.	Blambangan Pagar
8.	Sungkai Utara	16.	Bunga Mayang		

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara tahun 2023, persentase Padapekerjaan menurut lapangan usaha utama di Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 54,56% pertanian, 34,32% jasa dan 11,22% industri. Tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 540.511 jiwa yang hanya meliputi penduduk di desa.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 3 kabupaten tertua yang terdapat di Provinsi Lampung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 2.667,21 km², sedangkan luas wilayah administrasi yang hanya meliputi desa sebesar 2.635,07 km². Batas-batas di wilayah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023 adalah Kecamatan Tanjung Raja dengan luas sebesar 245,21 km² atau sebesar 9,31 % dari total luas wilayah kabupaten dilanjutkan dengan Kecamatan Abung Timur serta Abung Pekurun dan Bunga Mayang. Luas daerah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara akan dapat dilihat pada Tabel 12

Tabel 12. Luas dan persentase kecamatan hanya meliputi desa

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)
1	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	7	108,61	4,12
2	Kotabumi	Kotabumi Ilir	4	32,44	1,23
3	Sungkai Selatan	Ketapang	11	84,11	3,19
4	Tanjung Raja	Tanjung Raja	19	245,21	9,31
5	Abung Timur	Bumi Agung Marga	12	173,89	6,60
6	Abung Barat	Ogan Lima	14	58,40	2,22

Tabel 12. (Lanjutan)

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)
7	Abung Selatan	Kalibalangan	16	180.70	6,86
8	Sungkai Utara	Negara Ratu	15	132.38	5,02
9	Kotabumi Utara	Madukoro	8	110.31	4,19
10	Kotabumi Selatan	Mulang Maya	9	76.98	2,92
11	Abung Tengah	Gunung Besar	11	101.99	3,87
12	Abung Tinggi	Ulak Rengas	8	126.81	4,81
13	Abung Semuli	Semuli Jaya	7	120.43	4,57
14	Abung Surakarta	Tata Karya	9	99.08	3,76
15	Muara Sungkai	Negeri Ujung Karang	11	120.55	4,57
16	Bunga Mayang	Negara Tulang Bawang	11	144.98	5,50
17	Hulu Sungkai	Gedung Makripat	10	93.04	3,53
18	Sungkai Tengah	Batu Nangkop	8	110.86	4,21
19	Abung Perkurun	Pekurun Tengah	9	145.01	5,50
20	Sungkai Jaya	Cempaka	9	94.44	3,58
21	Sungkai Barat	Sinar Harapan	10	115.17	4,37
22	Abung Kunang	Aji Kangungan	7	48.82	1,85
23	Blambangan	Blambangan	7	110.86	4,21
Pagar					
Total			232	2635,07	100

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Luas wilayah di Kabupaten Lampung Utara berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan dari ahli fungsi lahan setiap tahunnya. Kecamatan yang mengalami perubahan luas wilayah adalah Kecamatan Tanjung Raja, Sungkai Barat dan Abung Kunang. Luas wilayah di setiap kecamatan pada periode 2018-2023 di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas wilayah di setiap kecamatan

No	Nama kecamatan	Luas Wilayah (km ²)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bukit Kemuning	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61	108,61
2	Kotabumi	32,44	32,44	32,44	32,44	32,44	32,44
3	Sungkai Selatan	84,11	84,11	84,11	84,11	84,11	84,11
4	Tanjung Raja	245,13	245,13	245,13	245,21	245,21	245,21
5	Abung Timur	173,89	173,89	173,89	173,89	173,89	173,89
6	Abung Barat	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40
7	Abung Selatan	180,70	180,70	180,70	180,70	180,70	180,70
8	Sungkai Utara	132,38	132,38	132,38	132,38	132,38	132,38
9	Kotabumi Utara	110,31	110,31	110,31	110,31	110,31	110,31
10	Kotabumi Selatan	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98
11	Abung Tengah	101,99	101,99	101,99	101,99	101,99	101,99
12	Abung Tinggi	126,81	126,81	126,81	126,81	126,81	126,81
13	Abung Semuli	120,43	120,43	120,43	120,43	120,43	120,43

Tabel 13. (Lanjutan)

No	Nama kecamatan	Luas Wilayah (km ²)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Abung Surakarta	98,99	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08
15	Muara Sungkai	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55
16	Bunga Mayang	144,98	144,98	144,98	144,98	144,98	144,98
17	Hulu Sungkai	93,04	93,04	93,04	93,04	93,04	93,04
18	Sungkai Tengah	110,86	110,86	110,86	110,86	110,86	110,86
19	Abung Perkurun	145,01	145,01	145,01	145,01	145,01	145,01
20	Sungkai Jaya	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44
21	Sungkai Barat	115,16	115,16	115,16	115,17	115,17	115,17
22	Abung Kunang	51,04	48,82	48,82	51,04	48,82	48,82
23	Blambangan Pagar	110,86	110,86	110,86	110,86	110,86	110,86
Total		2637,11	2634,99	2634,99	2637,28	2635,07	2635,07

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara, 2018-2023

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Lampung Utara terletak antara 4,34' sampai 5,06' Lintang Selatan dan 104,40' sampai 105,08' Bujur Timur berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 2.725,63 km². Kabupaten Lampung Utara berada di dataran rendah dengan kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Bukit Kemuning, sedangkan kecamatan yang memiliki ketinggian terendah adalah Kecamatan Kotabumi. Jarak antar kecamatan terhadap ibukota kabupaten juga berbeda-beda. Kecamatan Hulu Sungkai menjadi kecamatan dengan jarak yang jauh terhadap ibukota kabupaten. Selanjutnya, untuk Kecamatan Kotabumi Selatan menjadi kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten. Ketinggian setiap kecamatan dan jarak kecamatan ke ibukota kabupaten akan dijelaskan pada Tabel 14.

Tabel 14. Ketinggian kecamatan dan jarak ke ibukota kabupaten

No	Nama kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Bukit Kemuning	306	43
2	Kotabumi	26	-
3	Sungkai Selatan	60	20
4	Tanjung Raja	206	37
5	Abung Timur	35	12
6	Abung Barat	121	27
7	Abung Selatan	71	18
8	Sungkai Utara	63	32
9	Kotabumi Utara	61	10
10	Kotabumi Selatan	57	5
11	Abung Tengah	101	18
12	Abung Tinggi	203	38
13	Abung Semuli	70	17
14	Abung Surakarta	46	24
15	Muara Sungkai	51	40
16	Bunga Mayang	31	37
17	Hulu Sungkai	126	47
18	Sungkai Tengah	130	43
19	Abung Perkurun	77	20
20	Sungkai Jaya	79	15
21	Sungkai Barat	128	37
22	Abung Kunang	28	12
23	Blambangan Pagar	59	20

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Kabupaten Lampung Utara mempunyai 3 (tiga) gunung yang tersebar di 2 kecamatan. Gunung Haji dengan tinggi 1.710 m terletak di Kecamatan Bukit Kemuning, sedangkan Gunung Ulu Sabuk dan Gunung Tangkit Tebak terletak di Kecamatan Tanjung Raju dengan masing-masing ketinggian gunung adalah 1.713 m dan 2.115 m. Kabupaten Lampung Utara mempunyai total 15 sungai yang tersebar di beberapa kecamatan dengan panjang sungai yang berbeda-beda. Sungai terpanjang di Kabupaten Lampung Utara adalah Sungai Way Rarem dengan panjang mencapai 42 km. Sungai dengan panjang terpendek adalah Sungai Way Kelanga dengan panjang sungai mencapai 22 km. Gunung dan sungai yang terletak di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Gunung-gunung dan Sungai-sungai di Kabupaten Lampung Utara

Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Nama Gunung	Tinggi Gunung (m)
Way Rarem	42	Gunung Haji	1.710
Way Galing	27	Gunung Ulu Sabuk	1.713
Way Kulur	26	Gunung Tangkit	2.115
		Tebak	
Way Sabuk	38		
Way Kelamas	32		
Way Rendah	30		
Way Talang Mas	57		
Way Melungun	45		
Way Kelanga	22		
Way Sungkai Hulu	38		
Way Buluh	25		
Way Buyut	33		
Way Hanakau	29		
Way Sungko Hilir	25		
Way Papan	33		

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Kabupaten Lampung Utara mempunyai dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pengamatan suhu memiliki suhu yang relatif berbeda setiap bulannya. Suhu terendah yang tercatat terjadi pada Bulan Februari dengan suhu mencapai 20.00 °C, sedangkan suhu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan suhu yang mencapai 32.80 °C. Tahun 2023, kelembapan tertinggi tercatat pada Bulan Maret dan Juli dengan kelembapan sebesar 100 % dan kelembapan terendah terjadi pada Bulan Oktober dengan kelembapan 34 %.

3. Kondisi Kependudukan

Kabupaten Lampung Utara mempunyai penduduk yang sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara sebanyak 540.511 jiwa yang hanya berdasarkan penduduk yang berada di desa. Kabupaten Lampung Utara mengalami jumlah peningkatan penduduk dari tahun 2022 yang berjumlah 532.757 jiwa atau sebesar 7754 jiwa dan sebesar 1,46% di tahun 2023.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara di setiap kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah penduduk di setiap kecamatan

No	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk per Tahun (jiwa)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bukit Kemuning	36.699	22.805	23.594	23.632	24.609	25.249
2	Kotabumi	6.397	5.428	6.998	7.010	7.458	7.590
3	Sungkai Selatan	21.724	21.916	22.721	22.758	24.034	24.124
4	Tanjung Raja	31.169	31.301	31.953	32.004	33.411	33.886
5	Abung Timur	34.390	34.537	36.708	36.767	38.392	39.137
6	Abung Barat	18.750	18.830	20.472	20.505	21.224	21.556
7	Abung Selatan	49.778	49.899	52.463	52.547	53.564	54.460
8	Sungkai Utara	34.765	34.913	35.732	35.789	37.011	37.514
9	Kotabumi Utara	31.787	32.069	34.301	34.356	35.474	36.012
10	Kotabumi Selatan	13.665	13.936	13.812	13.861	14.963	15.157
11	Abung Tengah	18.626	16.869	17.164	17.192	17.916	18.021
12	Abung Tinggi	16.483	16.553	17.916	17.945	18.731	19.018
13	Abung Semuli	24.934	25.036	26.036	26.078	27.529	27.973
14	Abung Surakarta	28.232	28.352	28.385	28.431	29.726	30.165
15	Muara Sungkai	14.178	14.416	14.684	14.708	15.218	15.351
16	Bunga Mayang	32.928	33.220	33.839	33.893	34.244	34.373
17	Hulu Sungkai	14.383	14.444	14.979	15.003	15.343	15.461
18	Sungkai Tengah	16.400	16.470	17.053	17.089	18.110	18.505
19	Abung Perkurun	11.333	11.381	12.386	12.406	12.995	13.200
20	Sungkai Jaya	9.594	10.037	9.539	9.554	10.051	10.219
21	Sungkai Barat	12.734	12.792	11.809	11.828	12.548	12.750
22	Abung Kunang	9.579	9.620	9.947	9.963	10.117	10.339
23	BlambanganPagar	18.848	17.393	19.336	19.367	20.089	20.451
Jumlah Keseluruhan		507.376	492.217	511.827	512.686	532.757	540.511

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan dalam 4 (empat) tahun terakhir. Walaupun pada periode tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk, akan tetapi pada tahun 2019 jumlah penduduk mengalami penurunan. Peningkatan ini juga dapat berdampak terhadap kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Kepadatan penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Kepadatan penduduk di setiap kecamatan

No	Nama kecamatan	Kepadatan Penduduk per Tahun (jiwa/km ²)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bukit Kemuning	2.702	1.716	1.713	1.716	1.788	1.838
2	Kotabumi	1.018	865	1.122	1.124	1.186	1.209
3	Sungkai Selatan	3.399	3.481	3.541	3.546	3.742	3.753
4	Tanjung Raja	2.644	2.768	2.720	2.722	2.855	2.910
5	Abung Timur	2.817	2.918	3.141	3.146	3.411	3.458
6	Abung Barat	4.431	4.586	4.962	4.970	5.479	5.212
7	Abung Selatan	6.669	6.782	7.132	7.144	7.110	7.275
8	Sungkai Utara	4.780	4.525	4.697	4.704	4.858	4.920
9	Kotabumi Utara	2.379	2.367	2.567	2.571	2.660	2.702
10	Kotabumi Selatan	2.630	2.651	2.609	2.617	2.805	2.846
11	Abung Tengah	3.063	2.808	2.859	2.863	2.986	3.005
12	Abung Tinggi	1.174	1.188	1.278	1.280	1.335	1.354
13	Abung Semuli	1.481	1.509	1.549	1.551	1.642	1.674
14	Abung Surakarta	3.368	3.398	3.398	3.403	3.564	3.616
15	Muara Sungkai	1.484	1.396	1.433	1.435	1.482	1.494
16	Bunga Mayang	3.161	3.202	3.345	3.351	3.390	3.405
17	Hulu Sungkai	2.220	2.219	2.345	2.349	2.414	2.442
18	Sungkai Tengah	1.226	1.274	1.324	1.327	1.411	1.441
19	Abung Perkurun	1.348	1.347	1.573	1.576	1.653	1.697
20	Sungkai Jaya	1.006	1.052	1.011	1.013	1.066	1.088
21	Sungkai Barat	1.205	1.191	1.086	1.088	1.151	1.176
22	Abung Kunang	1.470	1.920	1.988	1.521	2.018	2.068
23	Blambangan Pagar	1.290	1.673	1.326	1.328	1.392	1.412

Sumber: Hasil Olah Penelitian, 2025

Peningkatan jumlah tidak terjadi pada jumlah penduduk miskin yang selalu mengalami penurunan. Kabupaten Lampung Utara mempunyai jumlah penduduk miskin yang banyak jika dibandingkan dengan kabupaten pemekarannya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara di setiap kecamatan akan dijelaskan oleh Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara

No	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin per Tahun (jiwa)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bukit Kemuning	4.492	4.726	4.751	4.556	4.527	4.466
2	Kotabumi	2.383	2.383	2.344	2.310	2.265	2.226
3	Sungkai Selatan	8.123	7.803	7.704	6.933	6.889	6.779
4	Tanjung Raja	9.951	10.062	9.907	9.417	9.339	8.607
5	Abung Timur	8.314	8.101	8.328	8.343	8.001	7.447
6	Abung Barat	6.431	6.473	6.249	3.801	3.725	3.587
7	Abung Selatan	8.403	7.845	7.679	5.965	5.658	5.430
8	Sungkai Utara	10.597	10.513	10.318	9.591	9.138	8.955
9	Kotabumi Utara	5.995	5.239	5.245	5.200	4.859	4.712

Tabel 18. (Lanjutan)

No	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin per Tahun (jiwa)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	Kotabumi Selatan	7.475	3.549	3.555	3.462	3.001	2.769
11	Abung Tengah	4.754	4.756	4.729	4.241	4.006	3.647
12	Abung Tinggi	5.816	5.526	4.923	4.719	4.542	4.381
13	Abung Semuli	4.776	4.996	5.003	4.764	4.551	4.354
14	Abung Surakarta	7.295	6.865	6.878	6.570	6.453	5.775
15	Muara Sungkai	6.750	6.582	5.905	5.776	5.467	4.912
16	Bunga Mayang	8.956	9.685	8.821	8.674	8.490	7.549
17	Hulu Sungkai	5.850	5.295	5.295	5.023	4.633	4.426
18	Sungkai Tengah	7.109	7.298	7.156	7.001	6.705	5.751
19	Abung Perkurun	4.264	4.263	3.199	3.137	2.884	2.869
20	Sungkai Jaya	4.973	4.715	4.698	4.541	4.414	4.133
21	Sungkai Barat	8.459	6.206	5.877	5.792	5.685	5.428
22	Abung Kunang	2.915	2.439	2.333	2.328	2.297	2.232
23	BlambanganPagar	3.751	4.424	4.425	4.355	4.280	4.126
Jumlah Keseluruhan		147.832	139.744	135.322	126.499	121.809	114.561

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2024

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara, 2018-2023

4. Status Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dibentuk sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, untuk mengurangi jumlah desa yang memiliki status tertinggal sampai dengan 5000 desa. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah desa dengan status mandiri hingga 2000 desa pada tahun 2019. Penilaian status indeks desa membangun berdasarkan nilai batas yang telah ditentukan berdasarkan Buku Indeks Desa Membangun. Nilai batas didapatkan berdasarkan dimensi yang telah ditentukan, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Status indeks desa membangun di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Utara memiliki status yang berbeda-beda setiap tahunnya. Periode tahun 2018-2023, status beberapa kecamatan mengalami peningkatan dan juga terdapat kecamatan yang memiliki status yang stagnan. Nilai status kecamatan ini didapatkan dari nilai indeks desa membangun di setiap desanya. Status indeks desa membangun di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Status indeks desa membangun di setiap kecamatan

No	Nama kecamatan	Status Indeks Desa Membangun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bukit Kemuning	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
2	Kotabumi	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
3	Sungkai Selatan	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
4	Tanjung Raja	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
5	Abung Timur	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
6	Abung Barat	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
7	Abung Selatan	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
8	Sungkai Utara	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
9	Kotabumi Utara	BKMB	BKMB	BKMB	MAJU	MAJU	MAJU
10	Kotabumi Selatan	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
11	Abung Tengah	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
12	Abung Tinggi	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
13	Abung Semuli	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
14	Abung Surakarta	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
15	Muara Sungkai	TTGL	TTGL	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB
16	Bunga Mayang	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
17	Hulu Sungkai	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
18	Sungkai Tengah	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
19	Abung Perkurun	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
20	Sungkai Jaya	TTGL	TTGL	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB
21	Sungkai Barat	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
22	Abung Kunang	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB
23	Blambangan Pagar	TTGL	TTGL	BKMB	BKMB	BKMB	BKMB

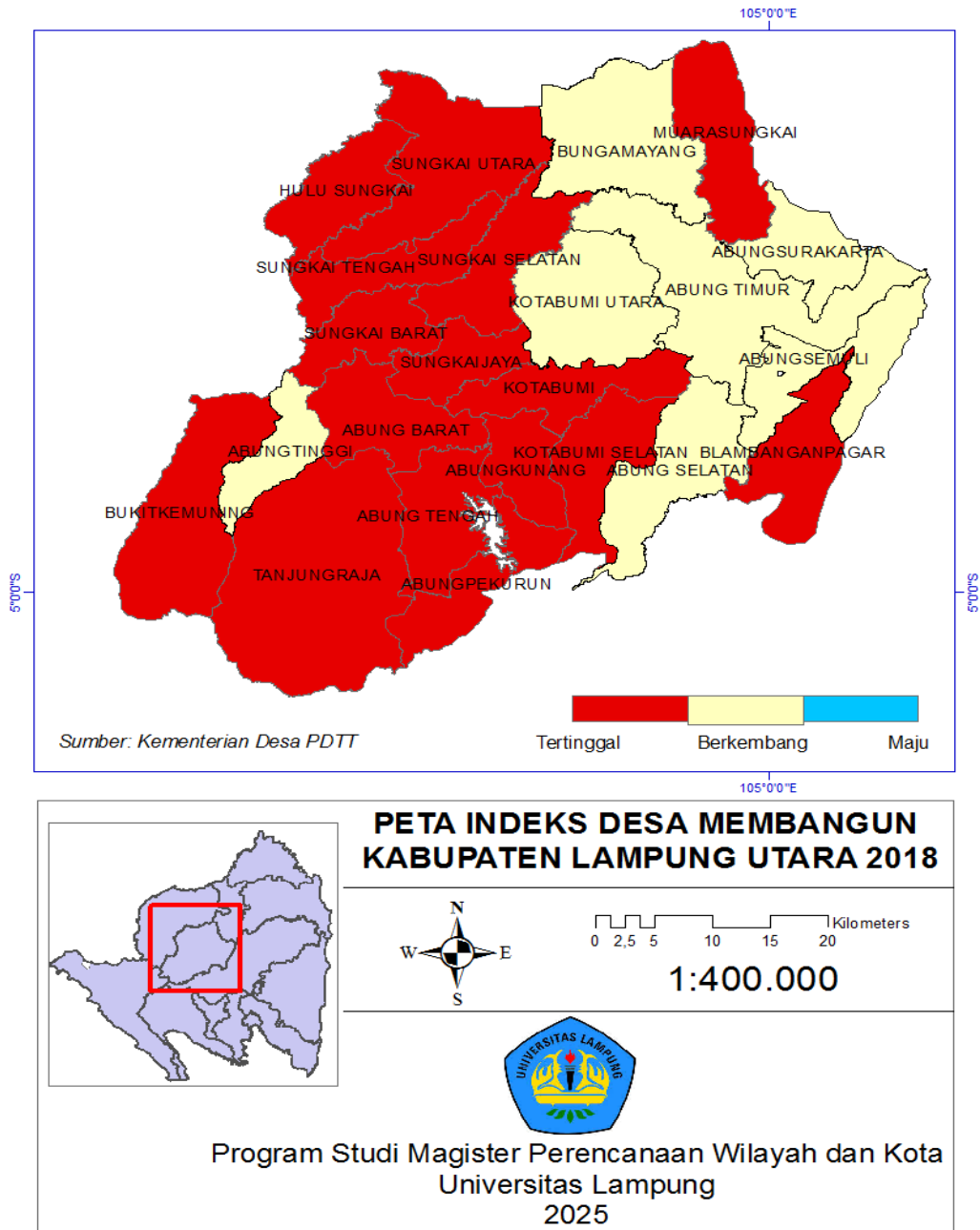
Sumber: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2023

Keterangan:

TTGL :Tertinggal

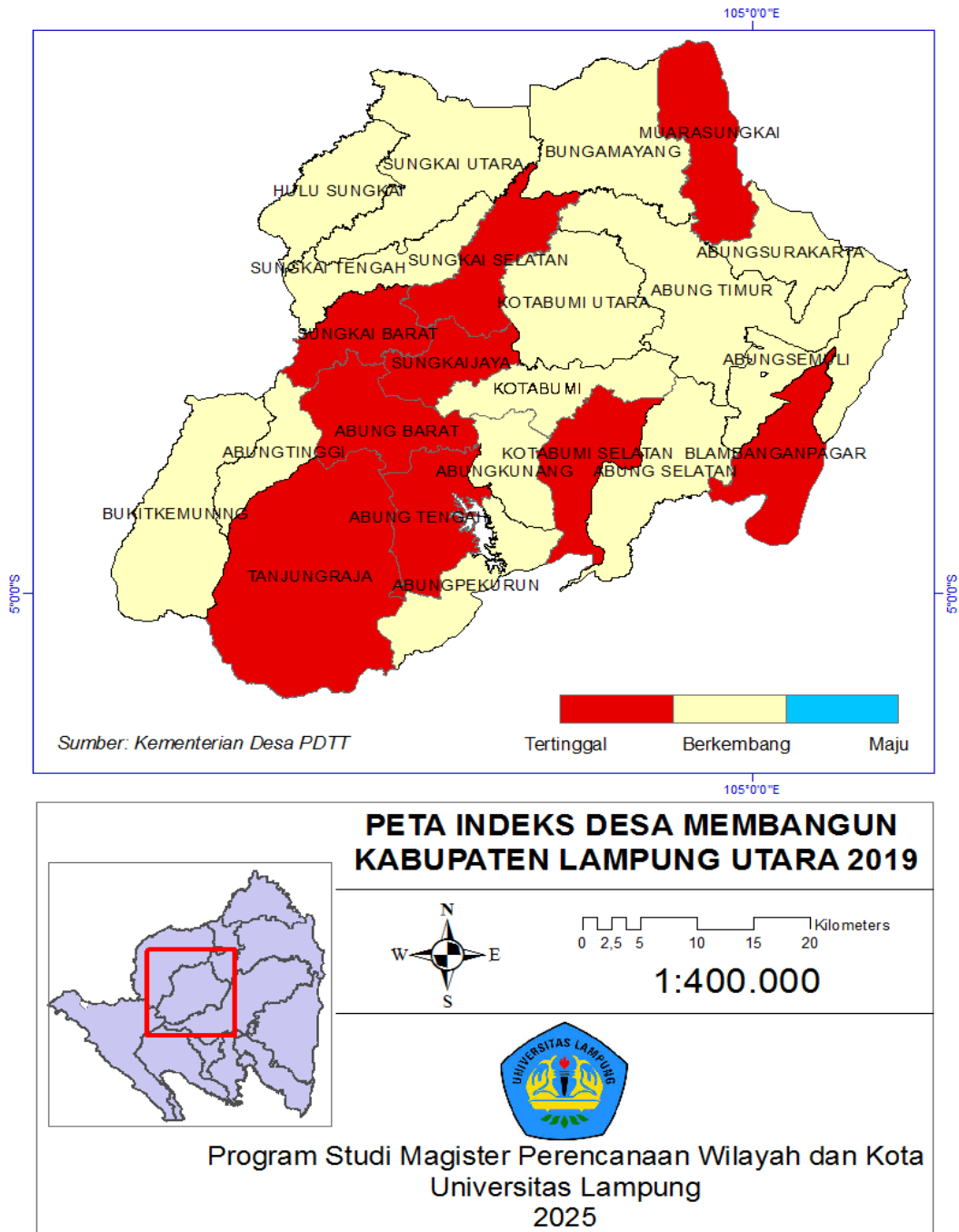
BKMB: Berkembang

Tahun 2018, hanya terdapat 7 kecamatan yang memiliki status berkembang yang artinya mempunyai nilai $> 0,599$. Selanjutnya, peningkatan terdapat di tahun 2023 kecamatan yang memiliki status berkembang sebanyak 22 dan 1 kecamatan memiliki status sebagai kecamatan maju. Gambar-gambar dibawah ini akan menjelaskan peta persebaran status indeks desa membangun setiap tahunnya. Peta persebaran status indeks desa membangun di tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 4.



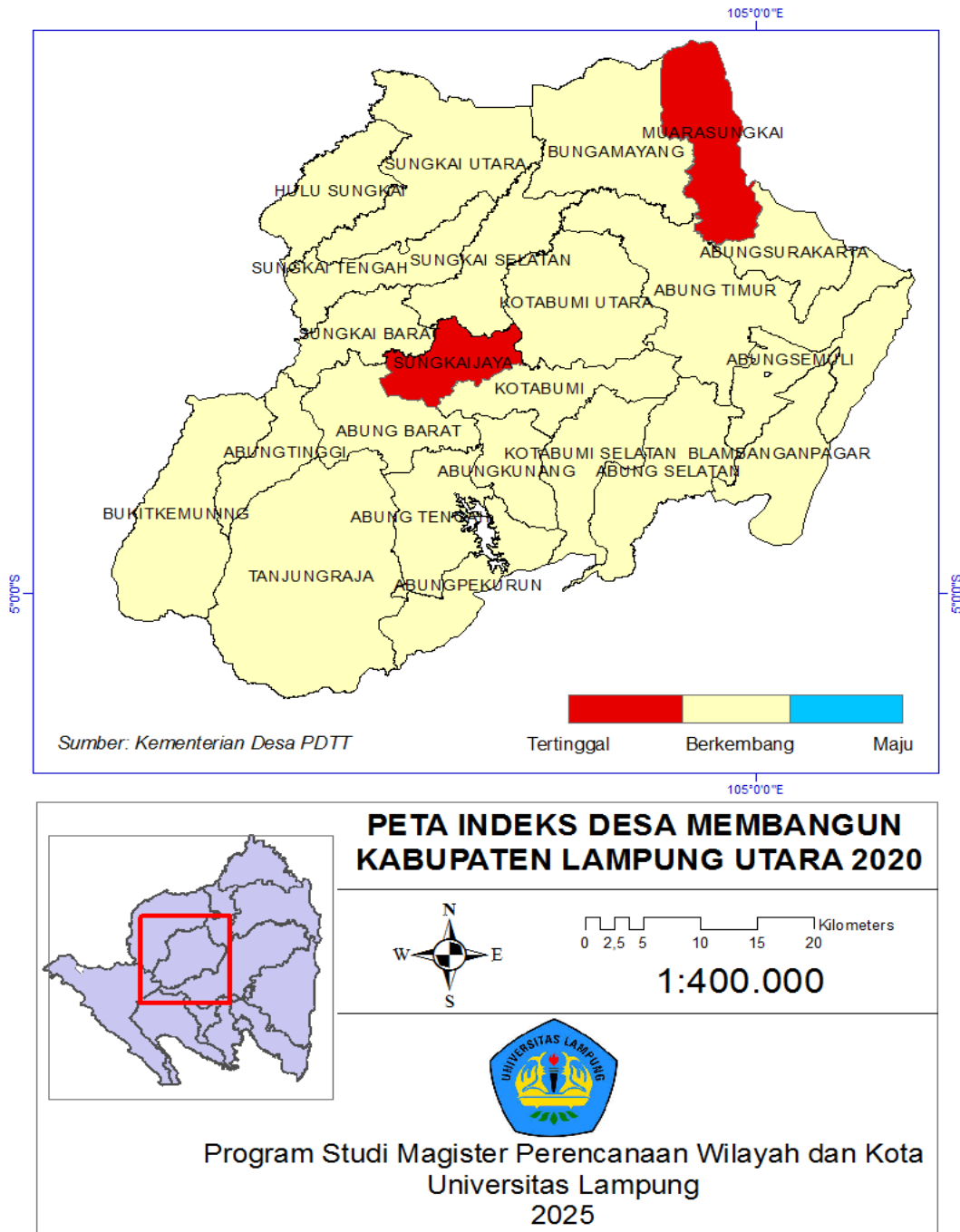
Gambar 4. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2018
Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Gambar 4 menjelaskan di tahun 2018, persebaran status indeks desa membangun di beberapa kecamatan yang memiliki status tertinggal terletak di beberapa perbatasan kabupaten dan hanya memiliki 7 status indeks desa membangun yang berkembang. Persebaran status indeks desa membangun di tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 5.



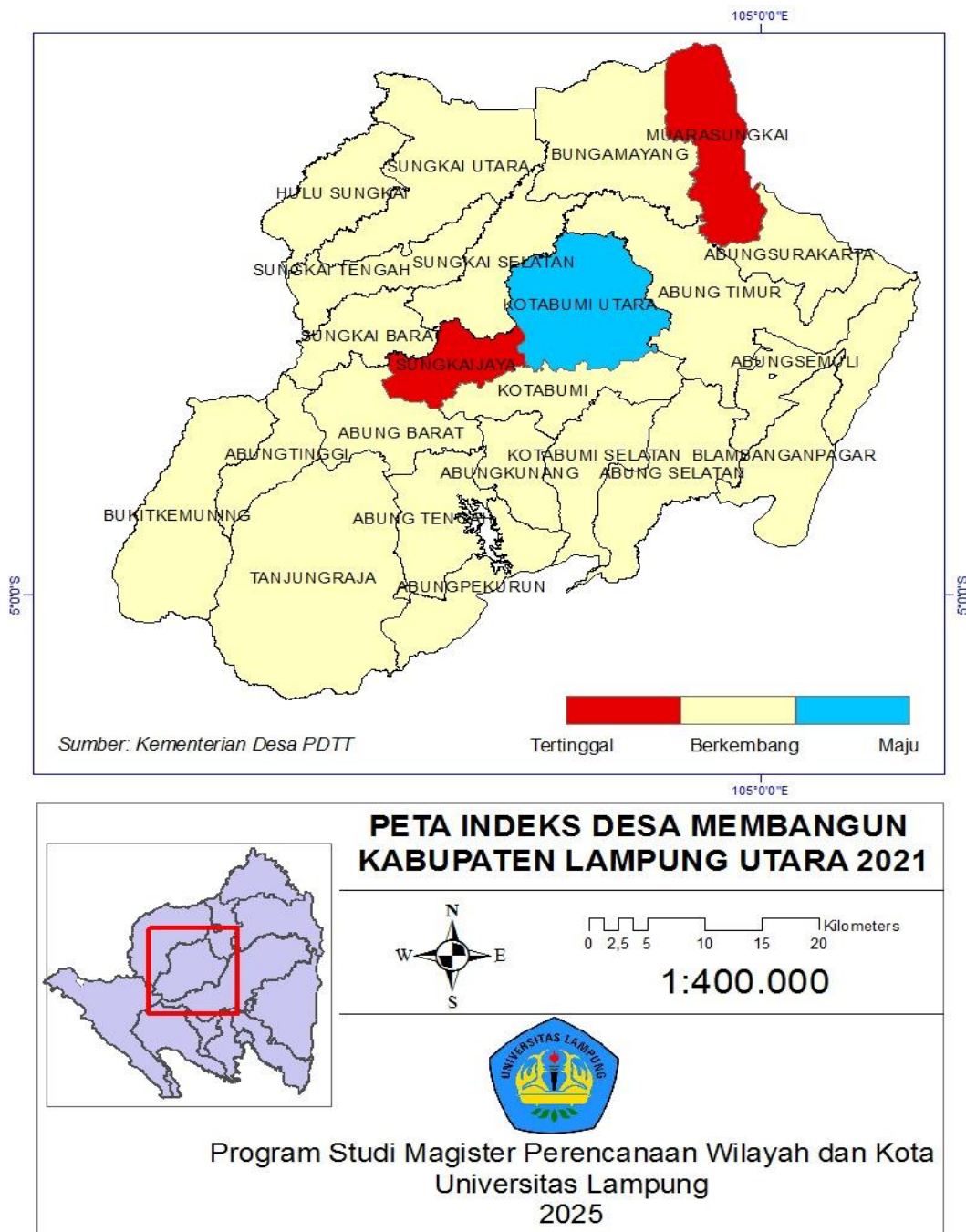
Gambar 5. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2019
Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Perubahan status dari tertinggal menjadi berkembang dapat dilihat pada Gambar 5, seperti Kecamatan Kotabumi yang menjadi kecamatan berkembang. Selanjutnya, terdapat 7 kecamatan yang mengalami perubahan satu menjadi berkembang sehingga hanya menyisakan 9 kecamatan dengan status tertinggal. Peta status indeks desa membangun di tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2020
Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

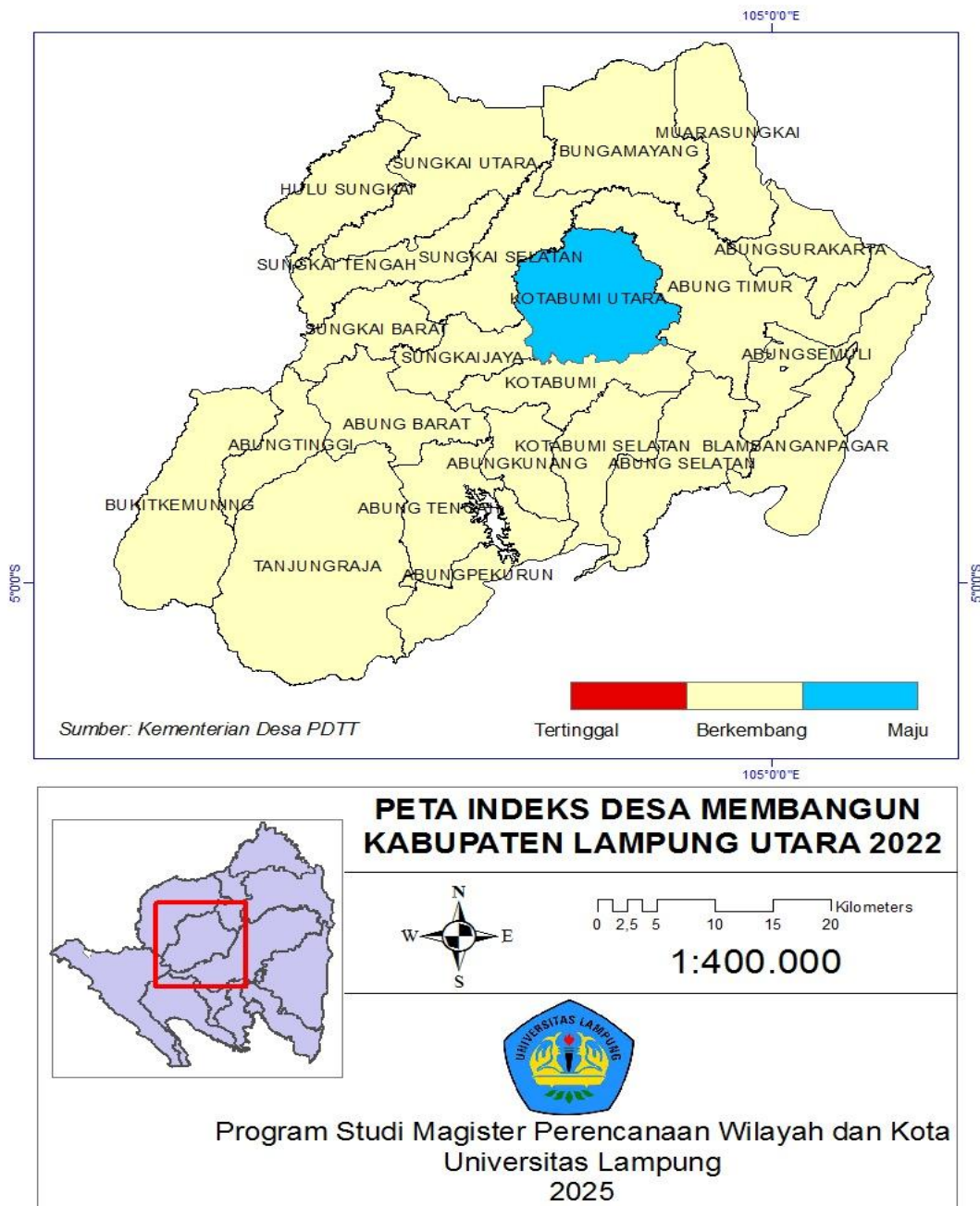
Tahun 2020, hanya terdapat 2 kecamatan dengan status tertinggal yaitu Kecamatan Muara Sungkai dan Sungkai Jaya. Peningkatan status 7 kecamatan terjadi pada tahun 2020, yaitu Kecamatan Sungkai Selatan, Tanjung Raja, Abung Barat, Kotabumi Selatan, Abung Tengah, Sungkai Barat dan Blambangan Pagar. Status indeks desa membangun di tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2021

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

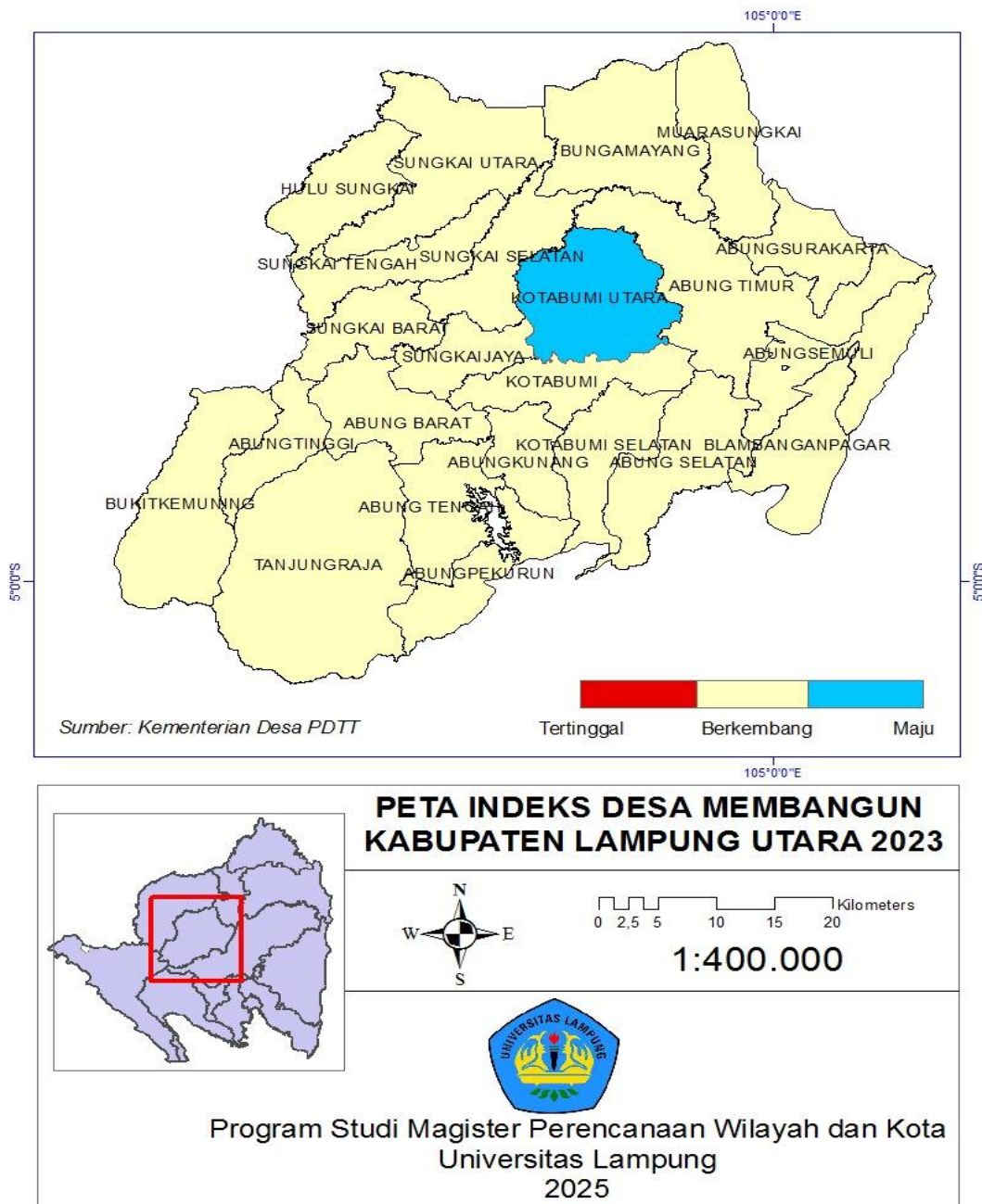
Tahun 2021, status kecamatan tertinggal tidak berubah dan tetap berjumlah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Sungkai dan Sungkai Jaya. Walaupun tidak banyak perubahan signifikan, tetapi Kecamatan Kotabumi Utara mengalami peningkatan status menjadi kecamatan maju. Persebaran status indeks desa membangun di wilayah kecamatan di tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2022

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Tahun 2022, Kecamatan Muara Sungkai dan Sungkai Jaya mengalami peningkatan kinerja dan status kecamatan tersebut mejadi kecamatan berkembang sehingga terdapat 22 kecamatan dengan status berkembang. Kecamatan Kotabumi Utara masih berstatus kecamatan maju. Status indeks desa membangun kecamatan di tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9. Peta persebaran status indeks desa membangun tahun 2023

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Tidak terdapat kecamatan yang mengalami perubahan status indeks desa membangun di tahun 2023, tetapi terdapat peningkatan nilai di beberapa kecamatan dan terdapat kecamatan yang mengalami penurunan kinerja atau stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada periode 2022 ke 2023 tidak terlalu signifikan, sehingga status di setiap kecamatan tidak mengalami perubahan atau peningkatan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja dan status indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2018-2023 terdapat peningkatan kinerja dan perubahan status, tetapi hingga tahun 2023 masih belum terdapat desa yang memiliki kinerja $> 0,815$ atau desa mandiri. Selain itu, beberapa wilayah mengalami penurunan dan stagnansi hingga di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu dimensi yang paling sering menyebabkan penurunan dan stagnansi di beberapa kecamatan hingga ke desa adalah dimensi Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks desa membangun secara simultan dan signifikan adalah X_1 (dana desa), X_2 (alokasi dana desa) X_3 (penduduk miskin) dan X_4 (kepadatan penduduk) terhadap Y (indeks desa membangun). Secara parsial, faktor-faktor yang mempunyai pengaruh secara signifikan adalah X_2 , X_3 , X_4 terhadap Y . Berdasarkan hasil penelitian, nilai dari *Adjusted R-Squared* adalah sebesar 0,4943 yang mana menunjukkan bahwa X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 mempunyai pengaruh sebesar 49,43% terhadap Y . Selanjutnya, sebesar 50,57% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk penelitian.

3. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja dan status indeks desa membangun adalah metode SWOT untuk mengetahui masing-masing dari kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi. Berdasarkan matriks SWOT, terdapat 9 strategi efektif untuk meningkatkan kinerja dan status indeks desa membangun, yaitu meningkatkan sumber daya manusia masyarakat, optimalisasi pengelolaan desa dengan basis teknologi digital, meningkatkan potensi wilayah dalam sektor ekonomi, meningkatkan pengawasan untuk sektor wisata, mengoptimalkan identifikasi terhadap potensi desa dan data desa, potensi pemasaran produk ke luar wilayah, penyediaan dan pemanfaatan lahan, penyediaan data tentang produk, dan pembinaan masyarakat tentang persaingan produk.

B. Saran

1. Peningkatan dimensi IKL dapat dilakukan dengan himbauan pemerintah daerah tentang pengurangan penggunaan plastik, pengurangan kendaraan pribadi, pemberian tempat pembuangan sampah yang layak serta program penghijauan dengan menanam pohon di sekitar rumah untuk menyerap karbon dioksida (CO₂). Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan mitigasi bencana alam, seperti memberikan pelatihan tentang tanggap bencana, memberikan pembuatan jalur evakuasi di setiap desa yang rawan terhadap bencana alam, dan penyediaan peralatan penanganan bencana alam yang disesuaikan dengan potensi bencana alam masing-masing desa.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan tentang penggunaan digitalisasi desa di setiap desanya untuk membantu dalam penerapan prinsip-prinsip dari *good governance*. Penerapan digitalisasi desa dan sistem informasi desa diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk memenuhi syarat-syarat *good governance*. Sistem informasi desa yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola desa.

Selain penerapan sistem informasi desa, digitalisasi desa juga dapat membantu peningkatan partisipasi masyarakat dengan adanya sistem informasi desa berbasis *website* dan aplikasi *mobile* untuk masyarakat dapat mengakses informasi yang ada di desa. Digitalisasi desa juga dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan analisis prediktif evaluasi penerapan *good governance* di desa yang mana diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki penerapan *good governance*.

3. Peningkatan nilai sumber daya manusia, mengoptimalkan pengelolaan desa dengan basis teknologi digital, dan meningkatkan potensi wilayah dalam sektor ekonomi juga diharapkan dapat berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang kebutuhan atau potensi peningkatan ekonomi dari masyarakat di desa hingga pelatihan literasi digital untuk pengelolaan teknologi berbasis digital. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi program pelatihan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok sasaran seperti kelompok perempuan, pemuda atau kelompok marginal lainnya. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu memberikan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dalam hal pelatihan, melainkan juga kebutuhan berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada di masing-masing desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Y. I. (2023). Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 29-54.
- Alfiansyah, D. N., Nastiti, & Hayatin. (2022). Penerapan Metode K-Means Pada Data Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Blitar. *Jurnal Repositor*, 49-58.
- Aprianti, W., & Maliha. (2016). Sistem Informasi Kepadatan Penduduk Kelurahan atau Desa Studi Kasus Pada Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sains dan Informatika*, 21-28.
- Arfianto, A. E., & Balahmar. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. 53-66.
- Arina, A. I., Vecky, M., & N., W. E. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22-41.
- Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 5 No. 2, 223-231.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Pengertian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta.

- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13 No.2*, 185-192.
- Fatimah, F. N. (2020). *Teknik Analisis SWOT (Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. R., & Taryani. (2023). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 51-71.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 48 No. 1*, 17-36.
- Istiqomah, & Irsad, A. (2017). Analisis SWOT dan Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 363-382.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *INDEKS DESA MEMBANGUN*. Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kementrian Keuangan.

- Khairussalam, Zulaikha, Nur, & Maimunah. (2024). Analisis Modal Sosial Dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *RESLAJ*, 909-918.
- Kurniawan, R. Y. (2016). *Analisis Regresi: Dasar dan Penerapannya dengan R*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, S. D., Widiastuti, Hermanto, Mukhlis, Pipin, Surianto, . . . Judijanto. (2024). *BIG DATA (Menenal Big Data dan Implementasinya di Berbagai Bidang)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Marhaeni, A. (2018). *Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Marwazi, A., Nuraini, Abdiyanto, Sugiarto, & Milanie. (2023). STUDI AWAL PERENCANAAN WILAYAH KOTA MEDAN. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 1402-1407.
- Oktaviana, O., & Bachruddin. (2017). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. 31-46.
- Otheliansyah, G., & Hizwar. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi Terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 94-105.
- Pahrijal, R. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pengabdian West Science*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (1959). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1964). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034*. Lampung Utara: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Putra, I. M. (2023). *Pengembangan Wilayah*. Sumatera Utara: CV. Prokreatif.
- Qudri, M., & Sari. (2023). Pengaruh Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di 23 Kabupaten atau Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 22-33.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.

- Rustiadi, E., Saefulhakim, & Panuju. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salmah, A. N. (2022). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Peningkatan Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Polokarto Tahun 2016-2021.
- Santosa, P., & Sarihati. (2024). *Buku Ajar Teori-teori Pemerintahan*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Sihombing, P. R., Arsani, Anggraini, & Pratiko. (2022). Implementasi Model SEM Pada Hubungan IPM, IPD dan IDM. *Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika*, 107-115.
- Suhyanto, O. (2020). Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 285-305.
- Sulaeman, M. M., & Homzah. (2014). *Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial dan Aplikasinya Yang Berbasis Masyarakat Petani Peternak Studi Kasus Pendekatan Sosiologis Pada Kelompok Organisasi Usaha Tani Ternak Sapi Perah di Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung*.
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif*, Vol. 9 No. 2, 439-446.
- Utami, A. P., Ibrahim, & Adnan. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. *Journal Of Law And Economics*, 83-98.
- Wahyuni, E., Qadri, & Elida. (2020). Implementasi Program Desa Mandiri Melalui Peningkatan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis*, 76-83.

- Wilujeng, T. A., Slamet, R., & Mohammad, S. R. (2019). Analisis SWOT dan Aspek Keuangan Studi Kelayakan Investasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 975-986.
- Yuliono, & Nanda, R. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Zaman, B., & Nurdiwaty. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal PETA*, 65-84.